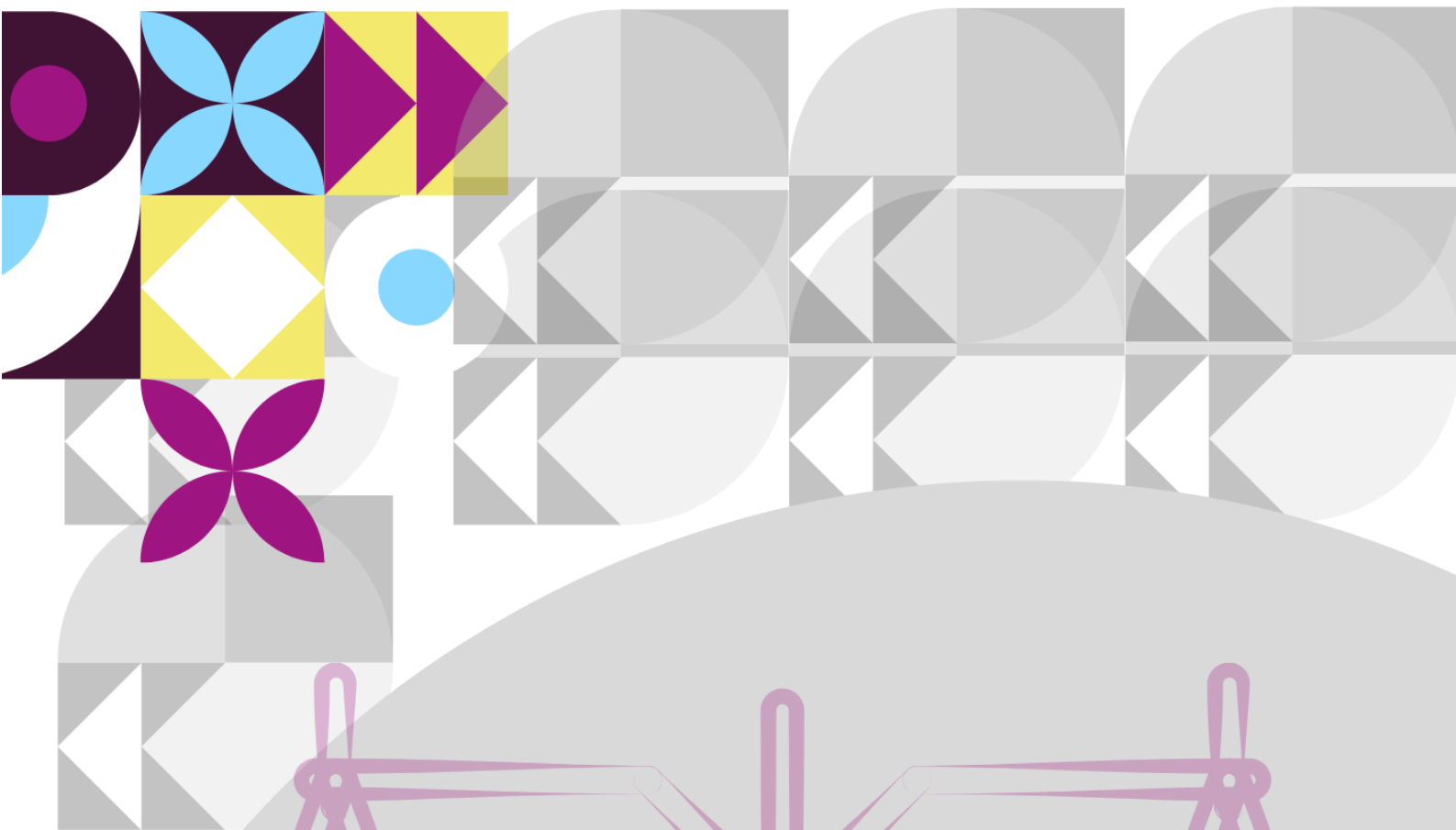




Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan  
Kementerian Kehutanan



# NERACA

SUMBER  
DAYA  
HUTAN

2025





**Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan  
Kementerian Kehutanan**

**NERACA  
SUMBER  
DAYA  
HUTAN  
2025**

## PENYUSUN

### Neraca Sumber Daya Hutan 2025

- Penulis : Fareza Ditya Aryanto, S.Hut  
Meniy Ratnasari, S.Hut, M.Sc  
Dewi Rahma Nur Afifah, A. Md
- Penanggung Jawab : Dr. Agus Budi Santosa, S.Hut, M.T  
(Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,  
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan)
- Ketua Tim : Dr. Doni Prabowo, S.Hut, M.T  
(Kepala Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan dan  
Informasi Geospasial Kehutanan)
- Editor : Joko Pramono, S.Si., M.T.  
Judin Purwanto, S.Hut., M.Si.  
Ahmad Basyiruddin Usman, Sc. Si.  
Hanifah Kusumaningtyas, S.Hut., M.S.E.  
Andi France Daryanto, S.Hut., M.URD.
- Kontributor Data : Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Badan Informasi Geospasial  
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan  
Informasi Geospasial Kementerian Kehutanan
- Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan,  
Kementerian Kehutanan

### Sitasi

Kementerian Kehutanan. 2025. *Neraca Sumber Daya Hutan Tahun 2025*. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kementerian Kehutanan. Jakarta.

*© Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan,  
Kementerian Kehutanan, 2025*

Alamat surat:

Gd. Manggala Wanabakti Blok 1 Lt. 7

Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta 10270

Email: simontana@menlhk.go.id

Telp. (021) 5730335-5730292

Fax. (021) 5730335

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberi petunjuk dan kemudahan hingga penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dapat diselesaikan. Buku NSDH ini disusun berdasarkan analisis hasil inventarisasi hutan nasional beserta data-data pendukung lain yang tersedia secara kontinyu. Menurut Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah untuk terakhir kalinya dengan UU. No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, untuk selanjutnya disebut UU41-1999/UU6-2023 yang dimaksud dengan NSDH adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

Neraca Sumber Daya Hutan Nasional Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 644/Kpts-II/1999 tanggal 19 Agustus 1999). Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) tahun ini memfokuskan dalam gambaran kondisi awal, perubahan dan kondisi akhir tentang penutupan hutan, potensi dan potensi moneter hasil hutan berupa kayu pada kurun waktu satu tahun. Buku NSDH dikelompokkan dalam dua komponen yaitu fungsi hutan dan tipe/penutupan hutan. Data dan informasi yang disajikan pada skala nasional, tingkat fungsi kawasan hutan, dan skala wilayah provinsi. Informasi tersebut dipandang dapat menjadi bio-indikator terhadap cadangan sumber daya hutan secara nasional. Ke depan, kami memandang penting untuk dikembangkan penghitungan NSDH yang lebih menyeluruh terutama terkait jasa lingkungan antara lain nilai ekonomi karbon.

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran yang sangat bermanfaat dan kerjasamanya dalam penyusunan NSDH ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya. Kami juga mengharapkan segala masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Buku NSDH kedepan. Semoga buku NSDH Nasional ini dapat bermanfaat.

Jakarta,

2025

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan,



Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE. IIAP

NIP. 19751026 199603 1 001

# DAFTAR ISI

<b>PENYUSUN</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
a. Latar Belakang	1
b. Tujuan	3
c. Tinjauan Pustaka	3
d. Sasaran	9
e. Ruang Lingkup	9
f. Batasan Istilah	9
<b>BAB II METODOLOGI</b>	13
a. Pengantar	13
b. Sumber Data	13
c. Metode Rekapitulasi Neraca Sumber Daya Hutan	14
<b>BAB III NERACA SUMBER DAYA HUTAN 2024</b>	23
a. Pengantar	23
b. Neraca Sumber Daya Lahan	23
c. Neraca Sumber Daya Kayu	27
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	32
<b>LAMPIRAN</b>	35
Neraca Sumber Daya Hutan	35

# DAFTAR GAMBAR

## **GAMBAR 1**

Konsep Sistem Neraca Nasional

4

## **GAMBAR 2**

Konsep NSDA - LH

5

## **GAMBAR 3**

Konsep Komponen Lingkup NSDH

6

## **GAMBAR 4**

Konsep Perhitungan NSDH Ideal

7

## **GAMBAR 5**

Bagan Alur Proses Perhitungan Neraca Sumber Daya Hutan

15

## **GAMBAR 6**

Proses Perhitungan Neraca Kawasan Hutan

16

## **GAMBAR 7**

Proses Perhitungan Neraca Penutupan Hutan

17

## **GAMBAR 8**

Proses Perhitungan Neraca Potensi Kayu

18

## **GAMBAR 9**

Proses Perhitungan Neraca Potensi Moneter Kayu

20

## **GAMBAR 10**

Neraca Kawasan Hutan di Indonesia

23

## **GAMBAR 11**

Neraca Kawasan Hutan per Fungsi Kawasan Hutan

24

**GAMBAR 12**

Neraca Penutupan Hutan di Indonesia

24

**GAMBAR 13**

Neraca Penutupan Hutan di Dalam dan Luar  
Kawasan Hutan (APL)

25

**GAMBAR 14**

Neraca Penutupan Hutan Terbesar di Lima  
Provinsi

26

**GAMBAR 15**

Neraca Penurunan Penutupan Hutan  
Terbesar di Lima Provinsi

26

**GAMBAR 16**

Neraca Potensi Kayu di Indonesia

27

**GAMBAR 17**

Neraca Potensi Kayu di Dalam dan Luar  
Kawasan Hutan (APL)

27

**GAMBAR 18**

Neraca Potensi Kayu Terbesar di Lima  
Provinsi

28

**GAMBAR 19**

Neraca Penurunan Potensi Kayu Terbesar di  
Lima Provinsi

29

**GAMBAR 20**

Neraca Potensi Moneter Kayu di Indonesia

30

**GAMBAR 21**

Neraca Potensi Moneter Kayu di Dalam dan Luar Kawasan Hutan (APL)

30

**GAMBAR 22**

Neraca Potensi Moneter Kayu Terbesar di Lima Provinsi

31

**GAMBAR 23**

Neraca Penurunan Potensi Moneter Kayu Terbesar di Lima Provinsi

31



# DAFTAR TABEL

## **TABEL 1**

Potensi Kayu Pada Masing – Masing Jenis dan Tipe Hutan

19

## **TABEL 2**

Nilai Moneter Kayu di Masing – Masing Wilayah

21

# DAFTAR LAMPIRAN

## **LAMPIRAN 1**

Neraca Sumber Daya Hutan

35

## Proporsi Luas Daratan Tahun 2024

Kawasan Hutan =  
63,3%

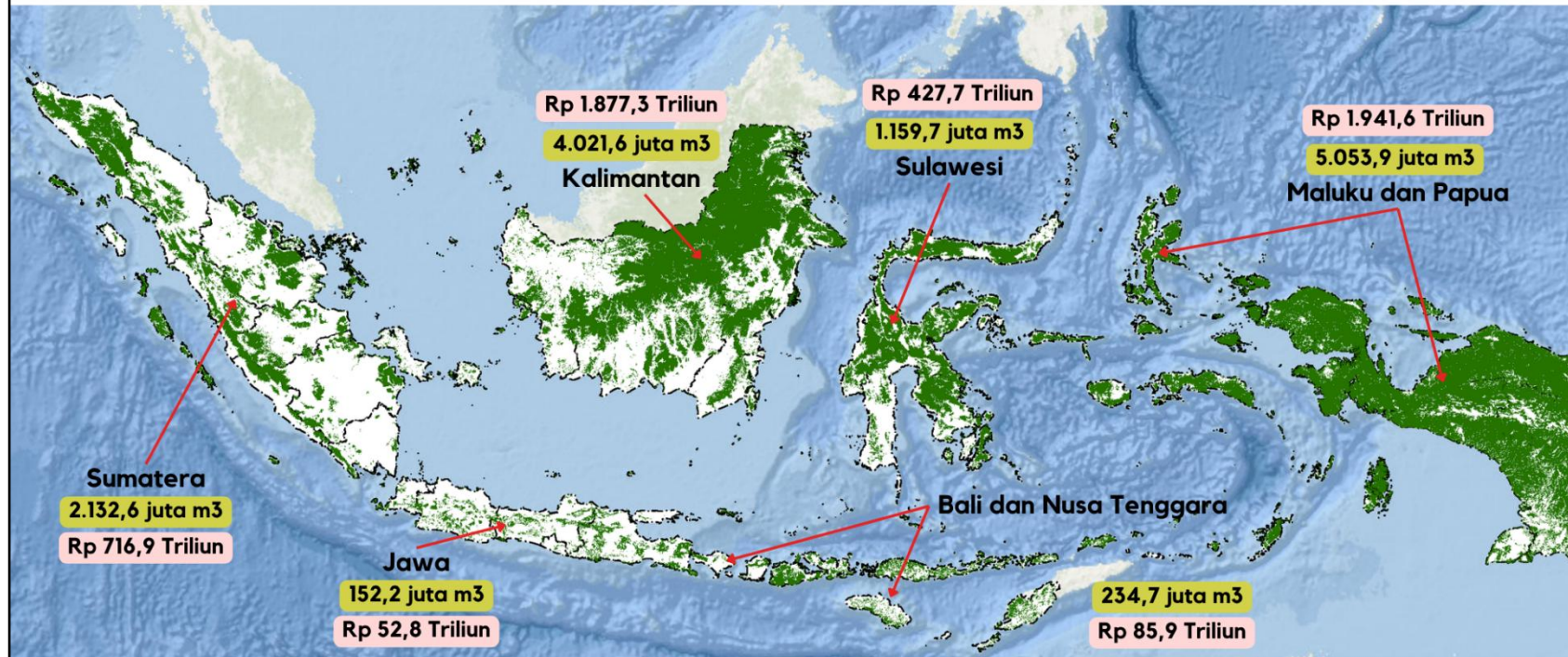
APL =  
36,7%

## Proporsi Penutupan Lahan Tahun 2024

Hutan =  
51,1%

Non Hutan =  
48,9%

## Besar Potensi dan Nilai Potensi Kayu Kawasan Hutan Menurut Pulau Tahun 2024



Potensi Kayu = 12.754,7 juta m<sup>3</sup>

Nilai Potensi Moneter Kayu = Rp 5.102,3 Triliun

## ABSTRAK

Sumber daya alam yang berupa hutan atau sumber daya hutan (untuk selanjutnya disebut sebagai SDH) beserta semua komponen yang saling berinteraksi di dalamnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan dan peranan sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia, sehingga memberikan manfaat untuk dikelola secara lestari, serasi, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan manusia pada umumnya dan bagi masyarakat Indonesia pada khususnya. Dalam rangka mencapai maksud di atas, perlu dilakukan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi SDH melalui beberapa instrumen antara lain penyusunan Neraca SDH ini.

Neraca SDH (untuk selanjutnya disebut sebagai NSDH) adalah instrumen yang dipergunakan untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan perubahan yang terjadi pada sumber daya hutan, baik dengan besaran fisik (luasan dan volume), maupun dengan besaran moneter. NSDH disajikan setiap tahun untuk memberikan gambaran perubahan tahunan yang terjadi pada sumber daya hutan. NSDH 2025 disajikan dengan menampilkan saldo awal (besaran tahun 2023) dan saldo akhir (besaran tahun 2024). Data yang disajikan dalam NSDH 2025 tersebut diantaranya berupa Neraca Sumber Daya Lahan yang didalamnya terkandung Neraca Kawasan Hutan, Neraca Penutupan Hutan, dan Neraca Sumber Daya Kayu yang didalamnya terkandung informasi berkaitan dengan Neraca Potensi Kayu dan Neraca Potensi Moneter Kayu. Data tersebut kemudian disajikan dalam setiap kelompok pulau dan provinsi. Dimulai dari NSDH 2022 prosedur perhitungan luasan diselaraskan dengan perhitungan luasan dalam Rekalkulasi Penutupan Lahan tahun 2021, yang didasarkan murni dari perhitungan berdasarkan perhitungan pada basis data geospasial kawasan hutan dan penutupan lahan.

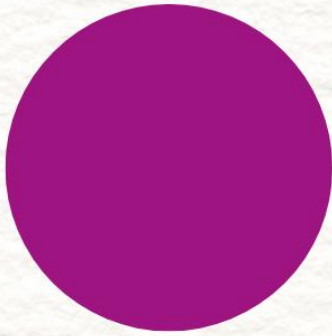
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka luas kawasan hutan Indonesia (yang berupa daratan) pada tahun 2024 adalah 118,3 juta ha. Luas tersebut terbagi ke dalam masing-masing fungsinya, diantaranya Hutan Konservasi (HK) dengan luasan 22,1 juta ha, Hutan Lindung (HL) dengan luasan 29,2 juta ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luasan 26,8 juta ha, Hutan Produksi (HP) dengan luasan 29,2 juta ha dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) dengan luasan 11,0 juta ha. Secara Nasional, luas kawasan hutan mengalami defisit sebesar 83,7 ribu ha dibandingkan dengan saldo awal luas awal sebesar 118,4 juta ha. Perubahan luas ini terjadi pada HK dengan kenaikan sebesar 13,3 ribu ha, HL mengalami penurunan sebesar 31,1 ribu ha, HPT mengalami penurunan sebesar 11,3 ribu ha, HP mengalami kenaikan sebesar 11,2 ribu ha, dan HPK mengalami penurunan sebesar 65,8 ribu ha.

Secara nasional, pada Tahun 2024 luas daratan yang berpenutupan hutan sebesar 95,5 juta ha atau sebesar 51,1 % dari total daratan. Perubahan penutupan hutan secara nasional mengalami defisit sebesar 175,4 ribu ha atau sebesar 0,2 % dari saldo awal. Pada saldo awal (kondisi tahun 2023), seluruh wilayah kawasan hutan mempunyai penutupan hutan sebesar 87,9 juta ha. Sementara pada saldo akhir (kondisi tahun 2024), penutupan hutan sebesar 87,8 juta ha. Berdasarkan data tersebut maka telah terjadi defisit penurunan penutupan hutan di kawasan hutan sebesar 113,1 ribu ha atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan saldo awal.

Sumber daya kayu disajikan dalam Neraca Potensi Kayu dalam satuan volume kayu ( $m^3$ ) dan Neraca Potensi Moneter Kayu dalam satuan mata uang rupiah (Rp). Saldo awal (kondisi tahun 2023) neraca potensi kayu sebesar 12.778,1 juta  $m^3$  dan saldo akhir (kondisi tahun 2024) sebesar 12.754,7 juta  $m^3$ , sehingga potensi volume kayu mengalami defisit sekitar 23,4 juta  $m^3$  atau sebesar 0,2%. Sementara untuk Neraca Potensi Moneter Kayu, saldo awal sebesar Rp. 5.113,4 Triliun dan saldo akhir sebesar Rp. 5.102,3 Triliun, sehingga nilai potensi kayu mengalami defisit sekitar Rp. 11,2 Triliun.

*Catatan:*

*Angka atau nilai bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan pembaharuan atau peningkatan akurasi data.*



**1**

# **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

*“Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak yang mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa”* (Penjelasan UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah untuk terakhir kalinya dengan UU. No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, untuk selanjutnya disebut UU41-1999/UU6-2023). Uraian tersebut menyiratkan bahwa hutan selain berfungsi sebagai kekayaan alam juga dapat berfungsi sebagai modal untuk pembangunan nasional.

Hutan sebagai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan menjadi bernilai strategis dan berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga hutan perlu dikuasai oleh negara. Penguasaan tersebut kemudian diterapkan dalam bentuk kegiatan perencanaan, pengelolaan, penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pengawasan, termasuk di dalamnya adalah memberikan izin kepada entitas yang memiliki kemampuan memadai untuk dapat memanfaatkan dan menggunakan hutan serta kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UU41-1999/UU6-2023).

Hutan sebagai sumber daya alam dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sampai dengan batas tertentu. Oleh karena itu pemanfaatan atau penggunaan hutan atau kawasan hutan perlu dikendalikan dengan baik agar sumber daya hutan tetap dapat bertahan lestari sebagai penyangga kehidupan umat manusia. Salah satu unsur pengendalian tersebut adalah pembatasan agar besaran yang dapat diambil dari alam tidak melampaui kapasitas hutan dalam melakukan regenerasi alami atau buatan sehingga fungsinya tidak terganggu. Pengendalian tersebut dapat diterapkan dengan baik apabila tersedia data dan informasi yang menggambarkan kondisi besaran sumber daya hutan tersebut serta termutakhirkan secara berkala dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 4 UU41-1999/UU6-2023 menyatakan bahwa hasil inventarisasi hutan pada tingkat nasional, wilayah, daerah aliran sungai dan unit pengelolaan dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan. Data dan informasi yang menggambarkan besaran sumber daya hutan terkini serta perubahannya dapat disajikan dalam berbagai instrumen, salah satunya dengan Neraca Sumber Daya Hutan (untuk selanjutnya disebut sebagai NSDH). NSDH secara umum memberikan data dan informasi terkait luasan hutan yang masih ada, estimasi besaran volume tegakan, serta estimasi nilai ekonomi hutan tersebut. Data dan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh perencana dan pengambil kebijakan untuk menimbang apa saja kegiatan yang dapat dilakukan pada

suatu lokasi tertentu yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (Darusman, 1991). Selain itu, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (untuk selanjutnya disebut sebagai PP23/2021), penyusunan rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu memperhatikan neraca sumber daya hutan.

Pemikiran terkait manfaat instrumen NSDH tersebut kemudian berkembang dan lebih terorganisir, sehingga kemudian menjadi salah satu amanat dalam UU41-1999/UU6-2023. Teknis penyusunan NSDH diuraikan lebih detil pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 644/Kpts-II/1999 (untuk selanjutnya disebut sebagai SK644/1999). Kedua kebijakan tersebut kemudian menjadi dasar perumusan Neraca Sumber Daya Hutan Indonesia sampai saat ini.

Perumusan NSDH pada tingkat Nasional selain merujuk pada rumusan yang diamanatkan pada SK644/1999, juga memperhatikan format penyajian yang disepakati di tingkat internasional. Pedoman di tingkat internasional yang sesuai adalah *System of Environmental – Economic Accounting (SEEA)* versi 2012 atau dapat juga disebut sebagai Sistem Neraca Ekonomi Lingkungan (NEL) (UN et al., 2014) yang juga diacu oleh Badan Pusat Statistik (BPS). NEL menggambarkan informasi ketersediaan sumber daya yang tersedia pada suatu wilayah atau negara sehingga pada waktu tertentu dapat dilakukan pengukuran kualitas ekosistem yang berada di dalamnya dan dapat digunakan di dalam perumusan analisis kebijakan. Informasi sumber daya yang terdapat di dalam NEL yang dikelompokkan dalam dua grup utama, yaitu cadangan (stok) dan arus sumber daya. Kelompok cadangan (stok) sumber daya antara lain kayu, lahan, air, mineral, dan ikan. Sedangkan kelompok arus sumber daya menyajikan informasi aktivitas ekonomi yang mempengaruhi perubahan kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut.

Dalam mengintegrasikan beberapa informasi sumber daya dan aktivitas yang berbeda antara ekonomi dengan lingkungan, NEL membagi metode pengukuran lebih mendetail. Metode pengukuran tersebut terbagi ke dalam empat jenis diantaranya adalah Neraca Aset Lingkungan, Neraca Arus Lingkungan, Neraca Aktivitas Lingkungan dan Neraca Ekosistem. Neraca Aset Lingkungan mencatat cadangan aset lingkungan di awal dan akhir periode pengamatan serta perubahannya. Neraca Arus Lingkungan menyediakan tabel penggunaan dalam satuan fisik dan atau moneter yang menampilkan arus input alam, produk dan residual. Neraca Aktivitas Lingkungan mencatat transaksi dalam satuan moneter antar pelaku ekonomi yang terkait aktivitas lingkungan. Neraca ekosistem mengukur kontribusi ekosistem dan jasanya terhadap kegiatan ekonomi dan aktivitas manusia. Dari keempat jenis Neraca terkait NEL, buku NSDH ini baru mampu menyajikan hasil pengukuran yang terkait dengan Neraca Aset Lingkungan.

Potensi yang terkandung di dalam hutan secara periodik mengalami perubahan, baik berupa penambahan ataupun pengurangan. Hal itu disebabkan oleh faktor alami atau akibat beberapa kegiatan di dalam pengelolaan hutan seperti kegiatan pemanfaatan hutan, perubahan fungsi, pelepasan, penggunaan kawasan, tukar – menukar, dan rehabilitasi hutan. Perubahan – perubahan tersebut perlu dipantau secara berkelanjutan agar Kementerian

Kehutanan sebagai penanggung jawab utama di dalam pengelolaan hutan dapat membuat suatu kebijakan yang baik dan terstruktur agar potensi hutan tetap lestari untuk kebaikan masyarakat dan negara Indonesia.

Berdasarkan data rekalkulasi penutupan lahan tahun 2024, luas daratan Indonesia adalah 187,9 juta ha yang terdiri dari luas kawasan hutan sebesar 118,3 juta ha dan luas area penggunaan lain sebesar 69,6 juta ha (KLHK, 2024). Luas kawasan hutan terbagi ke dalam beberapa fungsi kawasan hutan diantaranya adalah Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Masing – masing fungsi kawasan hutan tersebut memiliki karakteristik dan metode tertentu di dalam pengelolaannya, hal tersebut berkaitan juga dengan potensi yang terkandung di dalamnya.

## **b. Tujuan dan Maksud**

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi besaran sediaan awal, pengurangan, penambahan dan besaran sediaan akhir sumber daya hutan dari periode awal pengamatan sampai dengan periode akhir pengamatan.

Secara umum buku ini memberikan informasi kepada pihak terkait dengan maksud untuk:

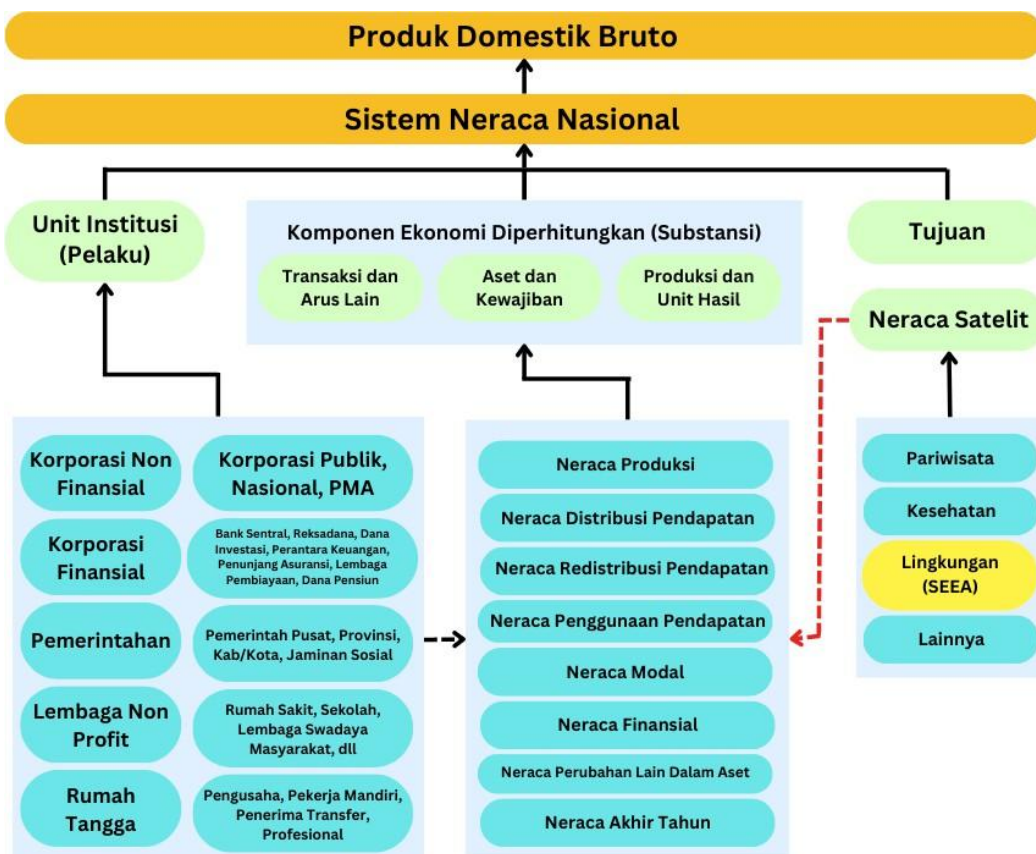
1. **Penyebarluasan data dan informasi sumber daya hutan dan dinamikanya.** Data dan informasinya mencakup data luas hutan/ kawasan hutan, potensi kayu dan potensi moneter kayu.
2. **Dasar pertimbangan penyusunan kebijakan Kementerian Kehutanan.** Hal ini mencakup dasar dalam penentuan strategi kebijakan pembangunan kehutanan dengan memperhatikan ketersediaan, perubahan dan kelestarian sumber daya hutan.

## **c. Tinjauan Pustaka**

Secara konseptual, pemikiran untuk merumuskan NSDH berawal dari pemikiran ekonomi. Pemikiran tersebut mendasarkan pada konsep bahwa sumber daya alam tersebut hanya tersedia terbatas. Sumber daya yang terbatas tersebut sebagian dapat diperbaharui (*renewable resources*), sebagian lagi tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*). Keterbatasan ketersediaan sumber daya alam tersebut mendorong upaya agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan arif dan bijaksana sehingga dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan (Repetto, 1988, Salim, 1990, Darusman, 1991).

Konsep keterbatasan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya mendorong perlunya untuk merumuskan suatu instrumen penghitungan besaran sumber daya tersebut. Secara umum, ketersediaan sumber daya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan proses produksi yang pada akhirnya akan menggerakkan perekonomian negara. Besarnya pergerakan perekonomian negara dapat diukur dengan instrumen yang dinamakan Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts - SNA*). Sistem tersebut dapat memperhitungkan besaran pergerakan perekonomian negara yang salah satunya mengukur dalam besaran Produk Domestik Bruto (PDB atau dikenal juga sebagai *Gross Domestic Product - GDP*). Detil metode perhitungan PDB dijelaskan dalam buku SNA 2008 yang

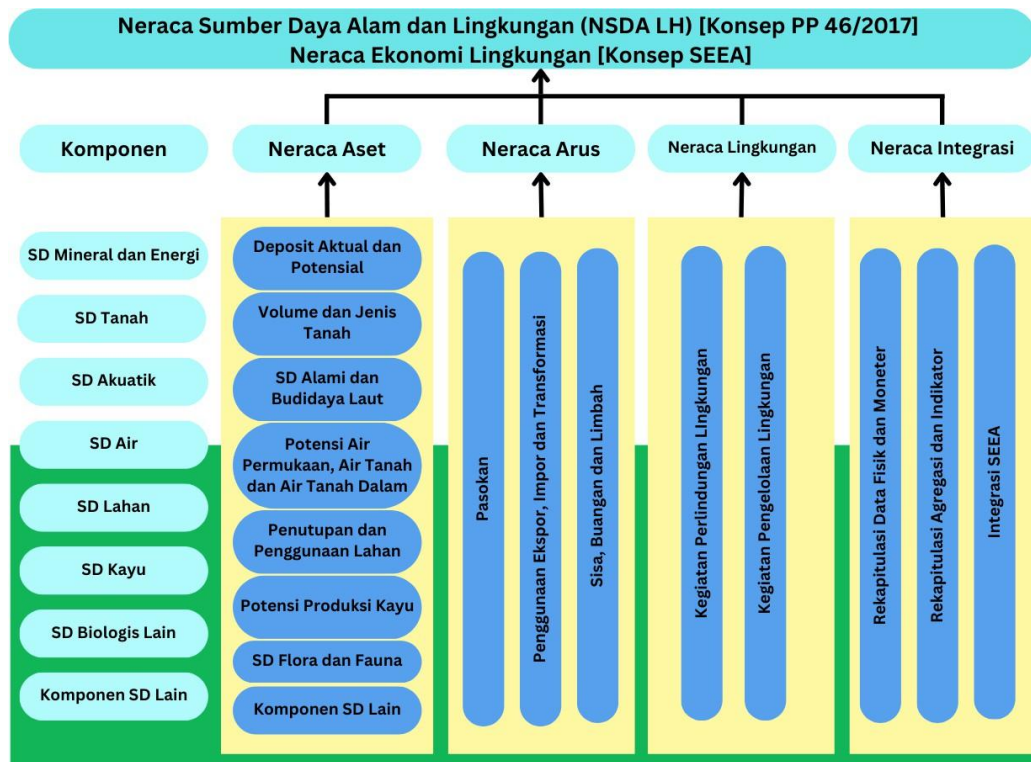
merupakan penyempurnaan dari buku SNA edisi sebelumnya (EU et al., 2009). Lingkup perhitungan dan konsep perumusan Sistem Neraca Nasional disajikan dalam gaftar sebagaimana Gambar 1. Pergerakan perekonomian negara selain diukur dengan metode PDB juga dapat diukur dengan metode lain antara lain Produk Nasional Bruto yang lebih dikenal sebagai *Gross National Product* - GNP atau Pendapatan Nasional Bruto yang lebih dikenal sebagai *Gross National Income* - GNI (Fraumeni & Okubo, 2005).



Gambar 1. Konsep Sistem Neraca Nasional

Sistem Neraca Nasional ternyata terlalu fokus pada kegiatan produksi sehingga tidak meliputi beberapa aspek ekonomi lainnya, diantaranya adalah aspek sumber daya alam. Aspek-aspek yang tidak terliput tersebut dan diketahui memberikan sumbangan pada pergerakan perekonomian negara kemudian diberikan alokasi khusus dalam bentuk Neraca Satelit (*Satellite Accounts*). Salah satu jenis neraca satelit adalah neraca lingkungan, yang dikenal di Indonesia sebagai Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA – LH). NSDA – LH tersebut merumuskan besaran sumber daya alam yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian negara. Panduan perumusan NSDA – LH secara internasional dikenal sebagai Sistem Neraca Ekonomi Lingkungan (*System of Environmental Economic Accounts – SEEA*) versi 2012 (UN et al., 2014, PP46/2017). Lingkup perhitungan dan konsep perumusan NSDA – LH disajikan dalam gaftar sebagaimana Gambar 2.





Gambar 2. Konsep NSDA - LH

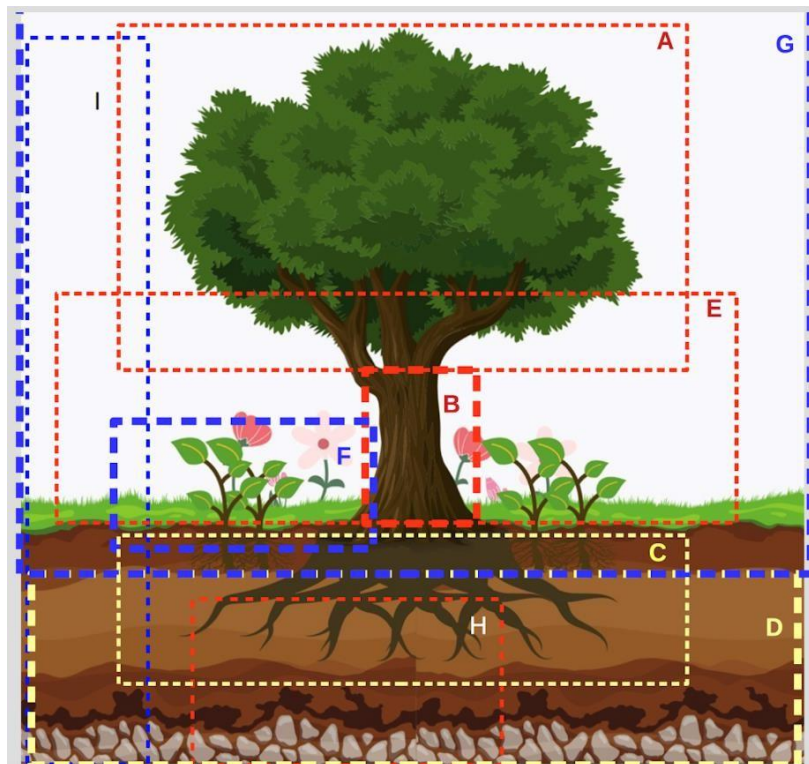
Komponen sumber daya alam yang diperhitungkan dalam SEEA 2012 terdiri atas: (i) sumber daya mineral dan energi, (ii) sumber daya lahan, (iii) sumber daya kayu, (iv) sumber daya air, (v) sumber daya akuatik, (vi) sumber daya tanah, dan (vii) sumber daya biologis lainnya. Komponen SEEA tersebut ternyata juga beririsan dengan konsep NSDH yaitu komponen (ii) sumber daya lahan, (iii) sumber daya kayu, (vii) sumber daya biologis lainnya, dan sebagian (iv) sumber daya air. Komponen tersebut kemudian secara teknis diuraikan dalam SK644/1999. Penilaian besaran sumber daya hutan dilakukan dengan dua pendekatan valuasi, yaitu (a) pendekatan valuasi fisik (dapat berupa luasan dan volume kayu) dan (b) pendekatan valuasi moneter (dengan besaran mata uang rupiah) yang dapat dinilai dengan beberapa jenis pendekatan.

Pendekatan penilaian penilaian pada paragraf di atas memusatkan perhatian pada empat komponen sumber daya, yaitu sumber daya lahan, sumber daya kayu, sumber daya biologis lainnya, dan sumber daya air. Apabila kita memandang hutan sebagai suatu ekosistem, maka ke-empat komponen tersebut ternyata belum mampu menggambarkan kompleksitas fungsi dan peran hutan secara keseluruhan. Secara sederhana, kami mencoba menggambarkan komponen fungsi hutan melalui apa yang dapat diberikan oleh sebatang pohon pada Gambar 3. Gambar tersebut membagi komponen di sekitar pohon menjadi:

- A. **Tajuk dan komponen ikutannya** (dapat dinilai sebagai instrumen produksi oksigen dan pembentukan iklim mikro);
- B. **Batang pohon dan komponen ikutannya** (dapat dinilai sebagai sumber daya kayu);

- C. **Akar dan komponen ikutannya** (dapat dinilai sebagai instrumen pengendalian sirkulasi air);
- D. **Tanah termasuk lapisan akuifer ikutannya** (dapat dinilai sebagai sumber daya tanah, *tidak termasuk lingkup NSDH*);
- E. **Ruang bawah tajuk** termasuk iklim mikro yang ditimbulkannya;
- F. **Flora dan fauna** yang habitatnya di dalam atau sekitar hutan;
- G. **Lahan dan komponen ikutannya** (dapat dinilai sebagai sumber daya lahan);
- H. **Energi dan mineral** yang berada di dalam tanah (dapat dinilai sebagai sumber daya mineral dan energi, *tidak termasuk lingkup NSDH*);
- I. **Air** dalam berbagai wujud sediaan dan ruang simpan (di udara, di permukaan tanah, dan di dalam tanah, *sebagian dapat menjadi lingkup NSDH*).

Dari seluruh komponen sekitar pohon yang diuraikan di atas, hanya komponen b (sumber daya kayu) dan g (sumber daya lahan) yang masuk dalam lingkup NSDH dan yang telah dilakukan inventarisasi secara berkelanjutan.



Gambar 3. Konsep Komponen Lingkup NSDH

Kemampuan penilaian atau inventarisasi terhadap komponen sumber daya hutan sebagaimana paragraf di atas masih terbatas pada sumber daya kayu dan sumber daya lahan. Hal tersebut disebabkan oleh tantangan dalam proses inventarisasi dan analisis lanjutannya, yang dapat berupa antara lain valuasi besaran fisik dan valuasi besaran moneter (monetisasi). Valuasi fisik untuk sumber daya kayu diarahkan untuk dapat menduga besaran volume kayu yang terdapat dalam suatu luasan hutan tertentu. Sedangkan valuasi fisik untuk sumber daya lahan diarahkan untuk dapat menduga luasan kawasan hutan dan penutupan lahan pada suatu wilayah tertentu. Valuasi moneter hanya dilakukan untuk sumber daya kayu, yaitu

dengan melakukan pendugaan besaran nilai sumber daya kayu dalam satuan mata uang. Besaran tersebut didapatkan dari hasil pendugaan volume kayu dan harga satuan per satuan volume.

Valuasi fisik dan moneter untuk sumber daya biologis lainnya mulai periode pengamatan tahun 2022, tidak dimasukkan dalam NSDH dengan pertimbangan sumber data yang tidak tersedia secara periodik dan berkelanjutan. Valuasi fisik dan moneter untuk sumber daya air belum dapat dimasukkan dalam NSDH dengan pertimbangan keterbatasan sumber data dan metode analisis. Valuasi fisik dan moneter untuk jasa lingkungan dan jasa wisata belum dapat dimasukkan dalam NSDH dengan pertimbangan, belum masuk dalam lingkup NEL, keterbatasan sumber data dan metode analisis, serta belum masuk dalam lingkup SK644 tahun 1999.



Gambar 4. Konsep Perhitungan NSDH Ideal

Gabungan valuasi fisik dan moneter merupakan fokus dari konsep NSDH yang sedikit berbeda dengan konsep statistik kehutanan. Statistik kehutanan lebih menekankan pada aspek data fisik atau data harga. NSDH selain memberikan perhatian pada aspek data fisik dan data harga, memperhatikan juga estimasi perubahan besaran cadangan sumber daya hutan baik dari segi besaran fisik maupun besaran moneter. Selain itu, NSDH juga dirancang untuk bisa diintegrasikan dalam NSDA-LH serta memberikan bahan perhitungan untuk Sistem Neraca Nasional, sebagai estimasi ketersediaan sumber daya penyangga kehidupan (Costanza et al., 1997). Pengembangan konsep NSDH sendiri sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya baru mulai bermunculan sekitar akhir dekade 1980-an. Sebelumnya, instrumen pengendalian masih lebih ditekankan pada informasi statistik (Repetto, 1988, Darusman, 1991).

Penerapan perhitungan NSDH pada umumnya dilakukan oleh suatu negara sesuai dengan kepentingan dan regulasi yang berlaku pada negara tersebut. Sepanjang penelusuran kami, belum banyak negara yang mengimplementasikan perhitungan NSDH. Negara-negara yang mengimplemetasikan NSDH mempergunakan nomenklatur yang bervariasi sesuai dengan kerangka hukum dan kebutuhan setempat. Nomenklatur yang berbeda-beda tersebut masih menempatkan produksi kayu sebagai dasar perhitungan utama. Pada umumnya, nomenklatur yang dipergunakan adalah NSDH atau Neraca Jasa Lingkungan (Galicía & Zarco-Arista, 2014, Ghazoul, 2009). Sebagai contoh kami sajikan contoh implementasi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan China-Taipei. Implementasi di RRT dilaksanakan dengan nomenklatur nilai jasa lingkungan hutan netto (NES). Konsep yang dikembangkan adalah nilai NES didapatkan dari hasil perhitungan nilai jasa lingkungan hutan (VES) dikurangi biaya-biaya (C). Nilai VES didapatkan dari hasil penjualan kayu, sedangkan C didapatkan dari hasil penjumlahan biaya-biaya (pengembangan hutan tanaman, irigasi, perlindungan hutan, pemeliharaan, dan pemupukan) (Cao et al., 2020). Implementasi NSDH di China-Taipei lebih komprehensif. Komponen yang diamati terdiri atas (i) konservasi sumber daya air hutan, (ii) pemurnian air, (iii) keanekaragaman hayati, (iv) teknik konservasi tanah, (v) penyerapan karbon, dan (vi) fungsi rekreasi, lingkungan, dan pendidikan. Masing-masing komponen memiliki metode valuasi tersendiri (Lin, 2021).

Pohon sebagai sebuah individu mempunyai beberapa manfaat baik itu dari bagian – bagiannya maupun secara keseluruhan tegakannya. Beberapa manfaat tersebut dapat dilakukan pendekatan dari beberapa bagian dan fungsi pohon seperti bagian kanopi pohon, bagian log batang kayu, bagian akar, fungsi pembuat iklim mikro, sebagai tempat tumbuh flora dan fauna jenis – jenis yang lain dan nilai lahan yang ada.

Pohon sebagai sebuah individu mempunyai beberapa manfaat baik itu dari bagian – bagiannya maupun secara keseluruhan tegakannya. Beberapa manfaat tersebut dapat dilakukan pendekatan dari beberapa bagian dan fungsi pohon seperti bagian kanopi pohon, bagian log batang kayu, bagian akar, fungsi pembuat iklim mikro, sebagai tempat tumbuh flora dan fauna jenis – jenis yang lain dan nilai lahan yang ada.

Tajuk dan kanopi pohon berfungsi untuk mengurangi tekanan air terhadap tanah saat terjadi presipitasi. Hal ini menurunkan tingkat limpasan yang menyebabkan erosi tanah. Sebagai tambahan informasi, pohon-pohon di Kota Tampa, Amerika Serikat pada tahun 1998 mampu membantu mencegah kerugian karena erosi senilai 10 juta dollar per tahun (Campbell

& Landry, 1998). Perhitungan ini didapatkan dari penambahan konstruksi bangunan untuk mencegah atau mengatur limpasan yang disebabkan oleh air hujan. Selain itu, kanopi yang terdiri dari daun sebagai tempat fotosintesis yang menghasilkan oksigen sebagai bahan pernafasan manusia.

Bagian batang kayu jika dipanen menghasilkan beberapa manfaat seperti dapat dijadikan sebagai bahan bangunan, *pulp*, bahan seni kerajinan dan beberapa kayu dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Indonesia mempunyai total potensi kayu sebesar 12.184,8 juta m<sup>3</sup> dan mempunyai nilai potensi sebesar Rp 4.888,5 Triliun (KLHK, 2021). Hal ini didapatkan melalui pendekatan penutupan lahan dan potensi kayu yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, NSDH baru dapat menghitung potensi kayu yang berada di Kawasan hutan.

Bagian akar pohon mempunyai beberapa fungsi diantaranya menjaga kestabilan tanah sehingga tidak mudah terjadi bencana longsor. Selain itu akar pohon juga dapat melakukan intersepsi air hujan. Nilai manfaat ekonomi hutan dari fungsi intersepsi air hujan di Beijing, China pada tahun 2004 mencapai  $2.757,27 \times 10^6$  Yuan atau sekitar Rp 6 Triliun dengan nilai konversi Rp 2.200,00 per satu yuan (Gaodi, et al., 2009)

Pohon mempunyai fungsi sebagai pembuat iklim mikro. Berdasarkan fungsi ini, Negara Taiwan dengan tutupan hutan seluas 1.695.469 ha mendapatkan manfaat penyaringan udara sebesar NT\$ 3.289 juta atau sekitar Rp 1,5 M dengan nilai konversi Rp 500,00 per satu Dollar Taiwan. Metode ini menggunakan pendekatan perhitungan perbedaan jumlah ion yang menyebabkan udara kotor yang dibawa oleh air hujan untuk wilayah di dalam hutan dan di luar hutan (Lin, Chiou, Chan, & Wu, 2021)

Hutan berfungsi sebagai tempat tumbuh baik flora dan fauna. Beberapa hal tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut hasil penelitian, flora di hutan Taman Nasional Gunung Halimun dan Hutan Lindung Gunung Salak mempunyai nilai manfaat sebesar Rp 575.118/tahun/rumah tangga dan fauna sebesar Rp 269.608/tahun/rumah tangga bagi masyarakat lokal (Bahruni, Nugroho, Kartodihardjo, & Hendrayanto, 2002).

#### **d. Sasaran**

Tersedianya data dan informasi NSDH 2025 dalam neraca potensi moneter kayu yang terbagi ke dalam masing – masing fungsi kawasan hutan dan 38 provinsi di Indonesia.

#### **e. Ruang Lingkup**

NSDH tahun 2025 menyajikan data dan informasi yang berkaitan tentang neraca kawasan hutan, neraca penutupan hutan, neraca potensi kayu dan neraca potensi moneter kayu.

#### **f. Batasan Istilah**

Beberapa Batasan istilah yang teradapat pada Neraca Sumber Daya Hutan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Neraca Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut sebagai NSDH** adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan, kehilangan dan penambahan sumber daya hutan sebagai akibat aktivitas pengelolaan hutan, sehingga pada waktu tertentu

dapat diketahui kecenderungannya apakah surplus atau defisit dibandingkan dengan waktu sebelumnya;

2. **Kawasan Hutan yang untuk selanjutnya disebut sebagai KH** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap, berdasarkan fungsinya kawasan hutan digolongkan menjadi tiga, diantaranya Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
3. **Hutan konservasi yang untuk selanjutnya disebut sebagai HK** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
4. **Hutan Lindung yang untuk selanjutnya disebut sebagai HL** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
5. **Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
6. **Hutan Produksi Tetap yang untuk selanjutnya disebut sebagai HP** adalah kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
7. **Hutan Produksi Terbatas yang untuk selanjutnya disebut sebagai HPT** adalah kawasan hutan produksi dengan pertimbangan faktor lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan masih dapat memproduksi hasil hutan secara terbatas;
8. **Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang untuk selanjutnya disebut sebagai HPK** adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan HP;
9. **Areal Penggunaan Lain yang untuk selanjutnya disebut APL** adalah penggunaan atau pengelolaan lahan di luar wilayah kawasan hutan;
10. **Penutupan lahan** adalah penyebutan kenampakan biofisik di permukaan bumi yang dapat berupa areal bervegetasi, lahan terbuka, lahan terbangun, serta tubuh air;
11. **Penutupan hutan** adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan;
12. **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah salah satu kondisi penutupan lahan yang dikelompokkan menjadi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman;
13. **Non Hutan yang untuk selanjutnya disebut sebagai NH** adalah bentuk penutupan lahan selain hutan yang berupa semak/belukar, belukar rawa, savana/padang rumput, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak,

transmigrasi, sawah, tambak, tanah terbuka, pertambangan, permukiman, rawa dan pelabuhan udara/laut;

14. **Hutan Alam yang untuk selanjutnya disebut sebagai HA** adalah kondisi penutupan lahan alami yang berupa hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, dan hutan mangrove sekunder;
15. **Hutan Tanaman yang untuk selanjutnya disebut HT** adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh hutan tanaman baik hutan tanaman yang berada di areal perizinan berusaha maupun hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam Kawasan Hutan maupun di APL;
16. **Neraca Sumber Daya Lahan** adalah neraca yang mencatat area lahan yang dimiliki oleh suatu wilayah beserta perubahannya selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini penyajian data neraca sumber daya lahan terdiri dari neraca kawasan hutan dan neraca penutupan lahan;
17. **Neraca Sumber Daya Kayu** adalah neraca yang mencatat stok sumber daya kayu pada awal dan akhir periode akuntansi serta perubahan stok selama periode tersebut. Dalam hal ini penyajian data dari neraca sumber daya kayu terdiri dari neraca potensi kayu dan neraca potensi moneter kayu;

**Catatan / Disclaimer:****Terkait Nomenklatur Judul Buku**

- Penamaan buku NSDH sesuai dengan tahun dikeluarkannya pembuatan buku tersebut. Data yang digunakan disesuaikan dengan data terbaru penutupan lahan yang ada dan data tahun sebelumnya. Dalam hal ini pembuatan Buku NSDH 2025 menggunakan data pada tahun 2023 dan 2024.

**Terkait Lingkup Data**

- Informasi yang disajikan dalam Buku NSDH 2025 adalah informasi tingkat tinjau (indikatif) dengan liputan seluruh Indonesia, untuk kepentingan perencanaan tingkat nasional, sehingga kedetilan informasi yang diberikan bersifat makro.

**Terkait Periodisasi Data**

- Penutupan lahan tahun 2023 dan tahun 2024 didasarkan pada hasil penafsiran penutupan lahan tahun 2023 dan tahun 2024 yang mempunyai skala 1:250.000.

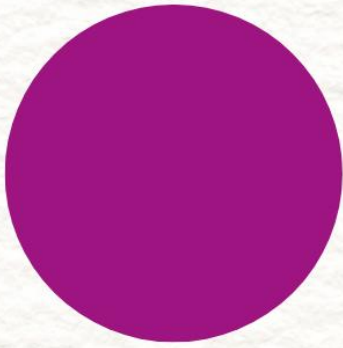
**Terkait Perhitungan Luas**

- Perhitungan luas kawasan hutan dan penutupan lahan di Indonesia tahun 2023–2024 dilakukan dengan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area (CEA), dengan pertimbangan cakupan seluruh wilayah Indonesia (membentang sebesar 46 derajat bujur arah barat timur dan 17 derajat lintang arah utara selatan). Hal ini untuk menegaskan bahwa perhitungan luas dapat berbeda dengan hasil perhitungan lapangan atau dengan perhitungan yang mempergunakan proyeksi berbeda, khususnya pada lokasi yang jauh dari khatulistiwa, seperti Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Utara, atau Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Data Luas Kawasan Hutan menggunakan data digital perkembangan pengukuhan kawasan hutan per September 2023 untuk kawasan hutan tahun 2023 dan per Juli 2024 untuk kawasan hutan tahun 2024, diakses dari basis data Subdit Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Informasi Geospasial Kehutanan, Dit. IPSDH, Kementerian Kehutanan pada bulan Juni 2025. Perhitungan luas kawasan hutan tidak lagi mempergunakan luas berdasarkan besaran yang tersebut dalam keputusan pengukuhan kawasan hutan. Oleh karena itu luas kawasan hutan dalam Buku NSDH ini dapat berbeda dengan luas dalam keputusan pengukuhan kawasan hutan.

**Terkait Penyesuaian Informasi**

- Dalam Buku NSDH 2025 informasi potensi kayu yang disajikan hanya yang berukuran lebih dari 20 cm. Hal tersebut dengan pertimbangan potensi kayu lebih dari 50 cm sudah termasuk dalam potensi kayu lebih dari 20 cm.
- Neraca potensi kayu dan neraca potensi moneter kayu hanya menghitung nilai berdasarkan penutupan lahan berupa hutan, untuk potensi kayu di luar penutupan hutan tidak dilakukan perhitungan.
- Neraca disajikan dalam dua kategori yaitu neraca sumber daya lahan dan neraca sumber daya kayu. Neraca sumber daya lahan terdiri dari neraca kawasan hutan dan neraca penutupan hutan, sedangkan neraca sumber daya kayu terdiri dari neraca potensi kayu dan neraca potensi moneter kayu.





# **METODOLOGI**

## BAB II METODOLOGI

### a. Pengantar

Kementerian Kehutanan (untuk selanjutnya disebut sebagai Kemenhut) adalah Kementerian yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut, kementerian menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan antara lain kelompok kegiatan yang berupa perencanaan kehutanan. Kegiatan perencanaan kehutanan terdiri atas beberapa jenis kegiatan di antaranya inventarisasi hutan, yang berfungsi untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (untuk selanjutnya disebut sebagai Permen 7/2021). Data dan informasi tersebut disajikan dalam berbagai instrumen atau publikasi, antara lain Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan, Buku Deforestasi, Buku Statistik Kehutanan, Buku SOIFO, dan Buku NSDH. Buku NSDH tersebut bertujuan untuk mencatatkan dinamika kondisi kawasan hutan dan cadangan (stok) sumber daya hutan yang penilaiannya didekati melalui pengamatan kondisi penutupan lahan hutan dan estimasi potensi volume sumber daya kayu.

Selain untuk kebutuhan penyediaan data dan informasi lingkup Kementerian Kehutanan, NSDH juga merupakan suatu instrumen yang diterbitkan oleh KLHK, dalam hal ini Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (untuk selanjutnya disebut sebagai IPSDH) untuk memberikan estimasi besaran sumber daya hutan sebagai bahan dalam penyusunan besaran Neraca Aset Lingkungan (atau dikenal juga sebagai Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang untuk selanjutnya disebut sebagai NSDA LH) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). NSDA LH itu sendiri merupakan komponen perencanaan pembangunan dalam kerangka Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut sebagai IELH yang diatur dalam PP46/2017).

### b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam perhitungan dan analisis NSDH adalah berupa data geospasial dan data tabular yang tersedia pada Direktorat IPSDH, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (untuk selanjutnya disebut sebagai Planologi). Data – data tersebut di antaranya adalah:

1. Data geospasial penutupan lahan hasil penafsiran Citra Landsat 8 OLI Tahun 2023 dan Tahun 2024 (*Direktorat IPSDH, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan*);
2. Data geospasial Dasar Indonesia (Rupa Bumi Indonesia - RBI) skala 1:50.000, (*diakses dari basis data JIG Kehutanan pada bulan Februari 2025*);

3. Data geospasial Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan per Juli 2023, (*diakses dari basis data JIG Kehutanan pada bulan Februari 2025*);
4. Data geospasial Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2023 sebagai data kawasan hutan tahun 2023, diakses dari basis data JIG Kehutanan pada bulan Februari 2025;
5. Data geospasial Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan Juli 2024 sebagai data kawasan hutan tahun 2024, diakses dari basis data JIG Kehutanan pada bulan Juni 2025;
6. Data tabular potensi rata – rata semua jenis kayu diameter lebih dari 20 cm tahun 2021, (*Direktorat IPSDH, Direktorat Jenderal PKTL*);
7. Data tabular potensi rata – rata semua jenis kayu di Pulau Jawa Tahun 2020 (*Perum Perhutani*);
8. Data tabular potensi moneter kayu (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 64 Tahun 2017).

### **c. Metode Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan**

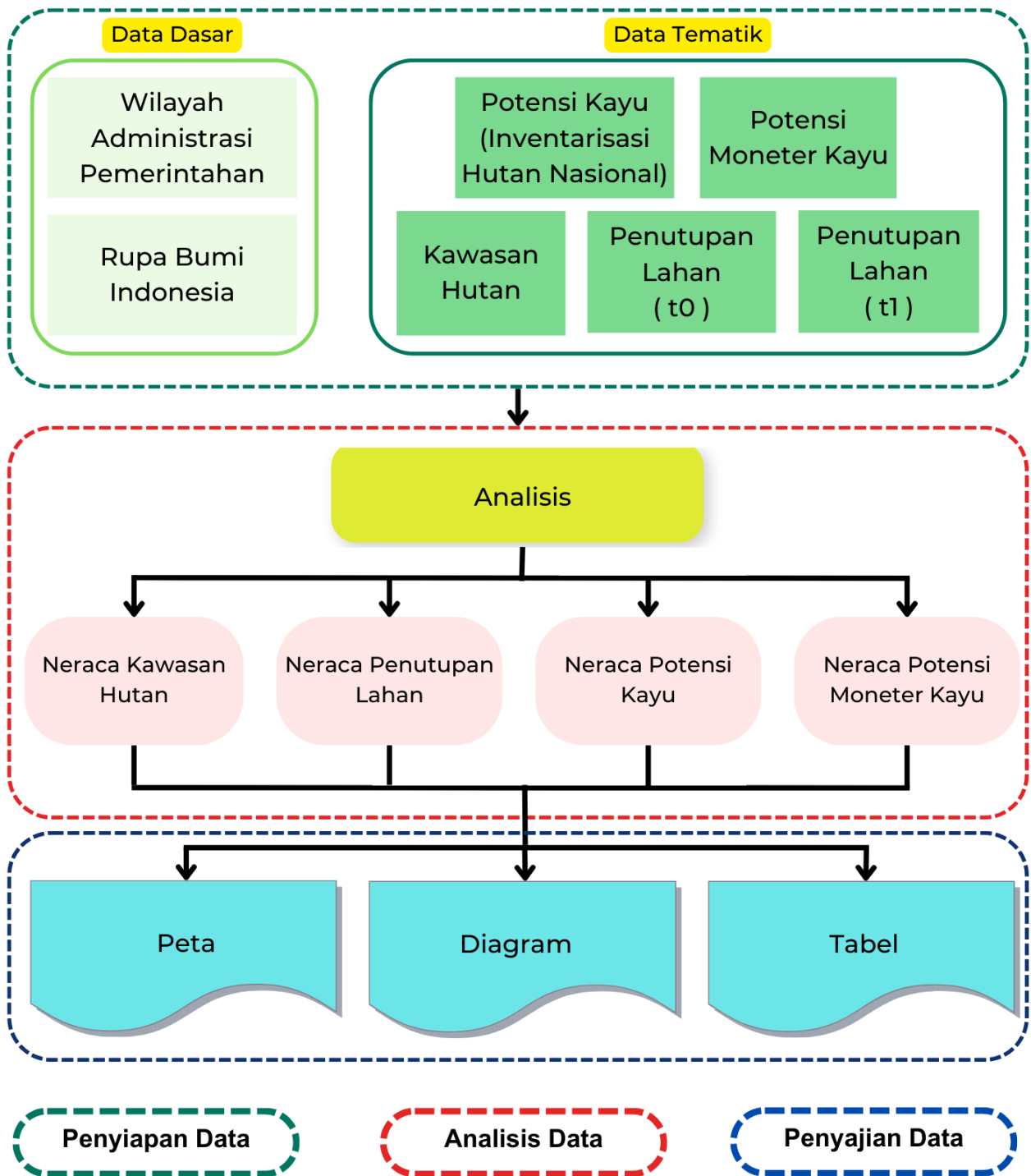
NSDH tahun 2025 memperhitungkan komponen sumber daya lahan (berupa kawasan hutan dan penutupan hutan) dan komponen sumber daya kayu (potensi kayu dan potensi moneter kayu). Perhitungan komponen - komponen tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data baik spasial maupun tabular. Metode perhitungan masing-masing komponen secara umum dilakukan secara bertahap yang terdiri atas (i) tahapan penyiapan data, (ii) tahapan analisis data, dan kemudian (iii) tahapan rekapitulasi data. Penjelasan tentang tahapan secara umum dijelaskan sebagai berikut. Tahapan analisis data dilakukan secara spasial dengan rincian sebagaimana Gambar 4.

#### **1. Penyiapan Data**

- Menyiapkan data geospasial (penutupan lahan, kawasan hutan, rupa bumi Indonesia, dan batas wilayah administrasi pemerintahan) serta data tabular (potensi kayu rerata dan harga kayu).
- Menghitung saldo awal.
- Mengumpulkan data dan informasi per provinsi tahun 2023 – 2024 tentang potensi kayu semua jenis dengan satuan  $m^3/ha$  pada tiap kawasan hutan, tipe hutan dan kondisi penutupan lahan, termasuk nilai/harga dalam rupiah per -  $m^3$  (Rp. /  $m^3$ ).

#### **2. Analisis Data**

Analisis data dilakukan untuk setiap jenis komponen yang berupa komponen sumber daya lahan dan komponen sumber daya kayu. Komponen sumber daya lahan menghasilkan luaran yang terdiri atas Neraca Kawasan Hutan dan Neraca Penutupan Hutan. Sedangkan komponen sumber daya kayu menghasilkan luaran berupa Neraca Potensi Kayu dan Neraca Potensi Moneter Kayu. Analisis untuk masing-masing jenis luaran diuraikan sebagai berikut.

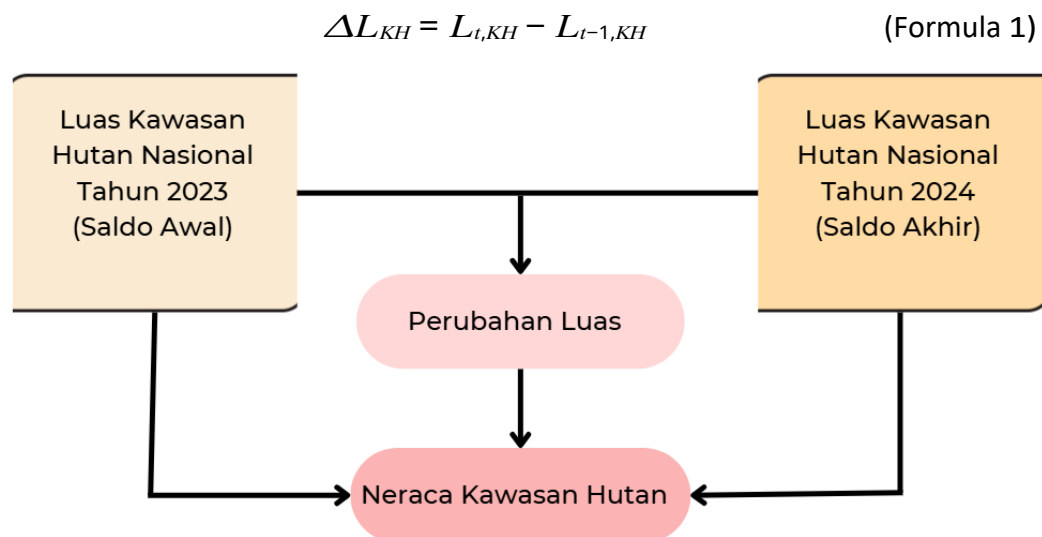


Gambar 5. Bagan Alur Proses Perhitungan Neraca Sumber Daya Hutan

- **Neraca Sumber Daya Lahan**

- **Neraca Kawasan Hutan**

Neraca Kawasan hutan didapatkan berdasarkan perubahan luas kawasan hutan nasional tahun 2023 dengan luas kawasan hutan nasional tahun 2024. Proses analisis tersebut dilakukan secara spasial melalui perhitungan luasan spasial pada masing-masing fungsi kawasan hutan untuk masing-masing periode pengamatan yaitu luas kawasan hutan tahun 2023 sebagai saldo awal ( $L_{t-1,KH}$ ) dan luas kawasan hutan tahun 2024 sebagai saldo akhir ( $L_{t,KH}$ ). Fungsi kawasan hutan (KH) yang dihitung luasnya secara spasial terdiri atas Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HPT), Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), serta Bukan Kawasan Hutan (APL). Perubahan Luas Kawasan Hutan ( $\Delta L_{KH}$ ) dihitung dengan formula sebagai berikut dan dilakukan untuk setiap fungsi kawasan hutan (KH) dan disajikan dalam satuan hektar (ha).



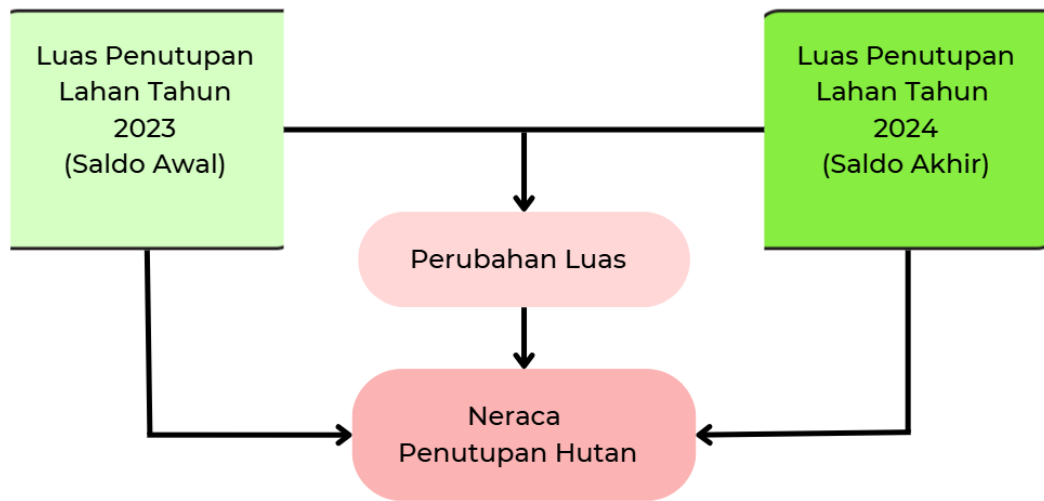
Gambar 6. Proses Perhitungan Neraca Kawasan Hutan

- **Neraca Penutupan Hutan**

Neraca penutupan hutan didapatkan berdasarkan perubahan luas penutupan lahan nasional tahun 2023 dengan luas penutupan lahan tahun 2024. Proses analisis tersebut dilakukan secara spasial melalui perhitungan luasan spasial pada masing-masing kelompok penutupan lahan untuk masing-masing periode pengamatan, yaitu luas penutupan lahan tahun 2023 ( $L_{t-1,PL}$ ) sebagai saldo awal dan luas penutupan lahan tahun 2024 sebagai saldo akhir ( $L_{t,PL}$ ). Jenis penutupan lahan (PL) yang dihitung luasnya secara spasial terdiri atas kelompok penutupan lahan berhutan (H) dan kelompok penutupan lahan tidak berhutan (NH). Kemudian melakukan analisis tumpang susun saldo awal dengan saldo akhir penutupan lahan. Perubahan Luas Penutupan Lahan ( $\Delta L_{PL}$ ) dihitung

dengan formula sebagai berikut dan dilakukan untuk setiap kelompok penutupan lahan serta disajikan dengan satuan luasan hektar (ha).

$$\Delta L_{PL} = L_{t,PL} - L_{t-1,PL} \quad (\text{Formula 2})$$



Gambar 7. Proses Perhitungan Neraca Penutupan Hutan

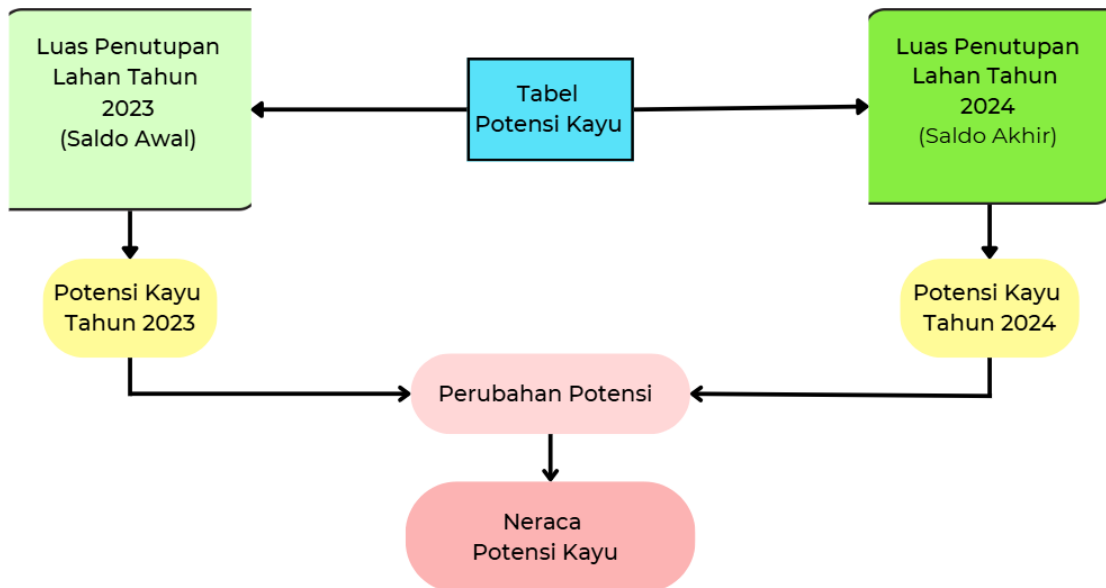
- **Neraca Sumber Daya Kayu**

- **Neraca Potensi Kayu**

Neraca potensi kayu didapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

- Menghitung potensi kayu untuk tahun 2023 sebagai saldo awal ( $V_{t-1,PL}$ ). Potensi kayu tahun 2023 dihitung luas kelas penutupan lahan tertentu dalam satuan hektar (PL) dengan besaran volume per satuan luas untuk kelas penutupan lahan tertentu dalam satuan  $m^3/ha$  ( $V_{PL}$ ). Besaran volume per satuan luas untuk setiap jenis penutupan lahan dan setiap provinsi diuraikan pada Tabel 1. Hasil perhitungan potensi kayu tahun 2023 disajikan dalam satuan  $m^3$ ;
- Menghitung potensi kayu untuk tahun 2024 sebagai saldo akhir ( $V_{t,PL}$ ). Potensi kayu tahun 2024 dihitung luas kelas penutupan lahan tertentu dalam satuan hektar (PL) dengan besaran volume per satuan luas untuk kelas penutupan lahan tertentu dalam satuan  $m^3/ha$  ( $V_{PL}$ ). Besaran volume per satuan luas untuk setiap jenis penutupan lahan dan setiap provinsi diuraikan pada Tabel 1. Hasil perhitungan potensi kayu tahun 2024 disajikan dalam satuan  $m^3$ ;
- Menghitung perubahan volume kayu dari tahun 2023 (saldo awal) ke tahun 2024 (saldo akhir) dengan volume sebagai berikut yang dilakukan untuk setiap kelas penutupan lahan dan disajikan dalam satuan  $m^3$ .

$$\Delta V_{PL} = V_{t,PL} - V_{t-1,PL} \quad (\text{Formula 3})$$



Gambar 8. Proses Perhitungan Neraca Potensi Kayu

Neraca potensi kayu didapatkan dari hasil perkalian luas penutupan lahan dari masing – masing ekosistem dengan potensi kayu dari masing – masing provinsi yang disajikan pada Tabel 1. Bentuk penyajian hasil analisis potensi sumber daya hutan dengan satuan  $m^3$  per masing – masing fungsi kawasan hutan dan provinsi.

Tabel 1. Potensi Kayu Pada Masing – Masing Jenis dan Tipe Hutan

No.	Provinsi	Penutupan Lahan (M <sup>3</sup> /Ha)				HutanTanaman
		Hutan Lahan Basah		Hutan Lahan Kering		
		Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	
1	Aceh	137,08	88,91	182,94	226,8	113,27
2	Sumatera Utara	137,08	88,91	210,59	180,96	113,27
3	Sumatera Barat	137,08	76,92	149,44	154,97	113,27
4	Riau	137,16	134,6	136,44	177,43	113,27
5	Kepulauan Riau	137,08	88,91	183,55	105,54	113,27
6	Jambi	137,08	88,91	214,13	113,58	113,27
7	Bengkulu	137,08	88,91	194,77	129,85	113,27
8	Sumatera Selatan	137,08	40,73	164,06	120,14	113,27
9	Kepulauan Bangka Belitung	137,08	41,48	183,55	60,13	113,27
10	Lampung	137,08	108,9	244,75	120,01	113,27
11	Banten					
	- HL dan Konservasi	117,3	68,59	130,23	131,9	-
	- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28
	- Hutan Produksi tetap (HP)	31,41	31,41	31,41	31,41	31,41
12	DKI Jakarta					
	- HL dan Konservasi	117,3	68,59	130,23	113,74	-
	- Hutan Produksi tetap (HP)	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat					
	- HL dan Konservasi	117,3	68,59	130,23	85,81	-
	- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28
	- Hutan Produksi tetap (HP)	31,41	31,41	31,41	31,41	31,41
14	Jawa Tengah					
	- HL dan Konservasi	117,3	68,59	57,94	47,77	-
	- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	59,36	59,36	59,36	59,36	59,36
	- Hutan Produksi tetap (HP)	36,16	36,16	36,16	36,16	36,16
15	DI Yogyakarta					
	- HL dan Konservasi	117,3	68,59	130,23	113,74	-
	- Hutan Produksi tetap (HP)	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur					
	- HL dan Konservasi	117,3	68,59	130,23	110,09	-
	- Hutan Produksi tetap (HP)	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54
17	Bali	117,3	68,59	154,43	55,72	113,27
18	Nusa Tenggara Barat	117,3	68,59	133,12	73,03	113,27
19	Nusa Tenggara Timur	117,3	68,59	121,55	73,54	113,27
20	Kalimantan Barat	182,91	115,83	191,2	170,53	113,27
21	Kalimantan Tengah	182,91	81,77	199,21	166,85	113,27
22	Kalimantan Selatan	182,91	89,92	147,19	142,72	113,27
23	Kalimantan Timur	182,91	89,92	162,49	114,22	113,27
24	Kalimantan Utara	182,91	89,92	173,65	123,56	113,27
25	Sulawesi Utara	117,3	68,59	248,09	204,08	113,27
26	Gorontalo	117,3	68,59	203,69	191,12	113,27
27	Sulawesi Tengah	117,3	68,59	155,25	112,62	113,27
28	Sulawesi Tenggara	117,3	68,59	76,68	36,35	113,27
29	Sulawesi Barat	117,3	68,59	149,92	191,12	113,27
30	Sulawesi Selatan	117,3	68,59	86,44	89,67	113,27
31	Maluku	117,3	120,42	149,49	138,3	113,27
32	Maluku Utara	117,3	68,59	118,05	138,07	113,27
33	Papua Barat	102,34	28,78	212,16	149,48	113,27
34	Papua Barat Daya	102,34	28,78	212,16	149,48	113,27
35	Papua	91,44	57,25	136,59	116,86	113,27
36	Papua Pegunungan	91,44	57,25	136,59	116,86	113,27
37	Papua Selatan	91,44	57,25	136,59	116,86	113,27
38	Papua Tengah	91,44	57,25	136,59	116,86	113,27

**Catatan:**

1. Potensi Hutan Mangrove dari hasil inventarisasi hutan nasional belum tersedia.
2. Potensi untuk Kawasan Hutan Hutan Produksi di Provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta tidak tersedia.

**Sumber Data:**

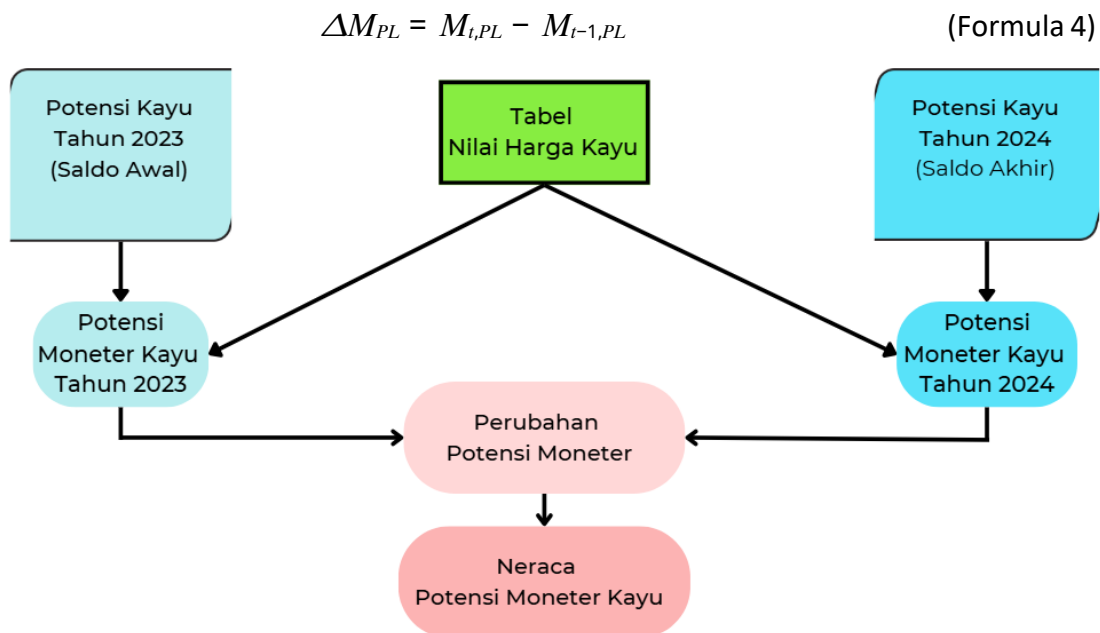
KLHK (2020), Perhutani (2020); Planologi (2020).



o **Neraca Potensi Moneter Kayu**

Neraca potensi moneter kayu didapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Menghitung potensi moneter kayu untuk tahun 2023 sebagai saldo awal ( $M_{t-1,PL}$ ). Potensi moneter kayu tahun 2023 ( $M_{t-1}$ ) dihitung berdasarkan perkalian volume kayu tahun 2023 (dalam satuan  $m^3$ ) dengan harga kayu per satuan volume tahun 2023 (dalam satuan rupiah/  $m^3$ ). Harga kayu per satuan volume diuraikan pada Tabel 2;
- ii. Menghitung potensi moneter kayu untuk tahun 2024 sebagai saldo akhir ( $M_{t,PL}$ ). Potensi moneter kayu tahun 2024 ( $M_t$ ) dihitung berdasarkan perkalian volume kayu tahun 2024 (dalam satuan  $m^3$ ) dengan harga kayu per satuan volume tahun 2024 (dalam satuan rupiah/  $m^3$ );
- iii. Menghitung perubahan potensi moneter kayu dari tahun 2023 (saldo awal) ke tahun 2024 (saldo akhir) dengan formula sebagai berikut yang disajikan dalam satuan rupiah.



Gambar 9. Proses Perhitungan Neraca Potensi Moneter Kayu

Tabel 2. Nilai Moneter Kayu di Masing – Masing Wilayah

No.	Wilayah	Semua Jenis Kayu Diameter ≥ 20 Cm (Rp./m <sup>3</sup> )	Semua Jenis Kayu Hutan Tanaman (Rp./m <sup>3</sup> )
<b>A. Wilayah I</b>			
1	P. Sumatera	370.000	100.000
2	P. Kalimantan	480.000	100.000
3	P. Sulawesi	370.000	100.000
4	P. Maluku	480.000	100.000
<b>B. Wilayah II</b>			
1	Bali	370.000	100.000
2	Nusa Tenggara Barat	370.000	100.000
3	Nusa Tenggara Timur	370.000	100.000
4	P. Papua	370.000	100.000
<b>C. Wilayah Jawa</b>			
1	P. Jawa (Konservasi dan HL)	200.000	-
2	Banten dan Jawa Barat untuk HPT	401.000	401.000
3	Banten dan Jawa Barat untuk HP	440.000	440.000
4	Jawa Tengah untuk HPT	433.800	433.800
5	Jawa Tengah untuk HP	625.500	625.500
6	Jawa Timur untuk HP	450.000	450.000

**Sumber Data:**

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan.
2. Nilai kayu pada Hutan Produksi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten diolah dari data standing stock yang bersumber dari Perum Perhutani Tahun 2020.

**3. Penyajian Data**

Neraca Sumber Daya Hutan disajikan ke dalam dua kategori yaitu Neraca Sumber Daya Lahan dan Neraca Sumber Daya Kayu. Neraca Sumber Daya Lahan terbagi ke dalam dua kategori yaitu neraca kawasan hutan dan neraca penutupan hutan. Neraca Sumber Daya Kayu terbagi menjadi dua kategori diantaranya adalah neraca potensi kayu dan neraca potensi moneter kayu.

- **Neraca Sumber Daya Lahan**

- **Neraca Kawasan Hutan**

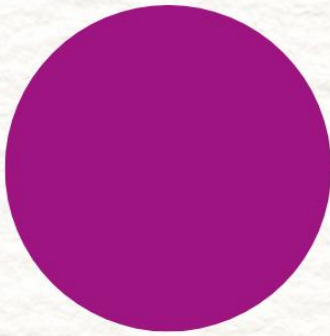
Data neraca kawasan hutan disajikan ke dalam bentuk perbandingan antara luasan pada saldo awal dengan saldo akhir. Perbandingan tersebut disajikan sesuai dengan fungsi masing – masing kawasan hutan dalam satuan luas hektar (ha).

- **Neraca Penutupan Hutan**

Data neraca penutupan hutan disajikan dalam bentuk perbandingan antara luasan penutupan lahan pada saldo awal dengan saldo akhir. Perbandingan tersebut menyajikan data penutupan lahan berupa hutan dan non hutan. Data disajikan dalam satuan masing – masing fungsi kawasan hutan, APL, dan wilayah provinsi sesuai dengan batas administrasi. Satuan yang digunakan di dalam penyajian penutupan lahan adalah hektar (ha).
- **Neraca Sumber Daya Kayu**
  - **Neraca Potensi Kayu**

Data neraca potensi kayu disajikan berupa potensi kayu dari masing – masing fungsi kawasan hutan, APL dan wilayah provinsi sesuai dengan batas administrasi. Data membandingkan potensi antara saldo awal dengan saldo akhir. Data disajikan dalam satuan m<sup>3</sup> untuk menduga volume kayu yang menjadi potensi sumber daya hutan pada masing – masing wilayah.
  - **Neraca Potensi Moneter Kayu**

Data neraca potensi moneter kayu disajikan dengan membandingkan saldo awal dengan saldo akhir. Data disajikan dalam bentuk nilai potensi moneter kayu dari masing – masing fungsi kawasan hutan, APL dan wilayah provinsi sesuai dengan batas administrasi. Nilai potensi moneter disajikan dalam bentuk rupiah (Rp).



**NERACA  
SUMBER  
DAYA HUTAN  
2025**

### BAB III

## NERACA SUMBER DAYA HUTAN 2025

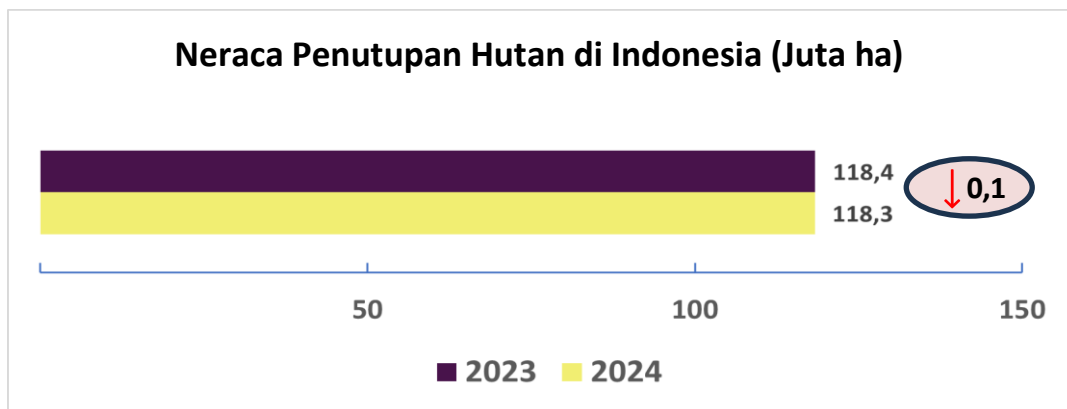
#### a. Pengantar

Hasil kegiatan inventarisasi sumber daya hutan yang kemudian dihitung dan disajikan dalam Neraca Sumber Daya Hutan merupakan gambaran atas kondisi dugaan sumber daya hutan. NSDH terbagi ke dalam dua bagian diantaranya adalah neraca sumber daya lahan yang terdiri dari neraca kawasan hutan dan neraca penutupan hutan, serta neraca sumber daya kayu yang terdiri dari neraca potensi kayu dan neraca potensi moneter kayu.

#### b. Neraca Sumber Daya Lahan

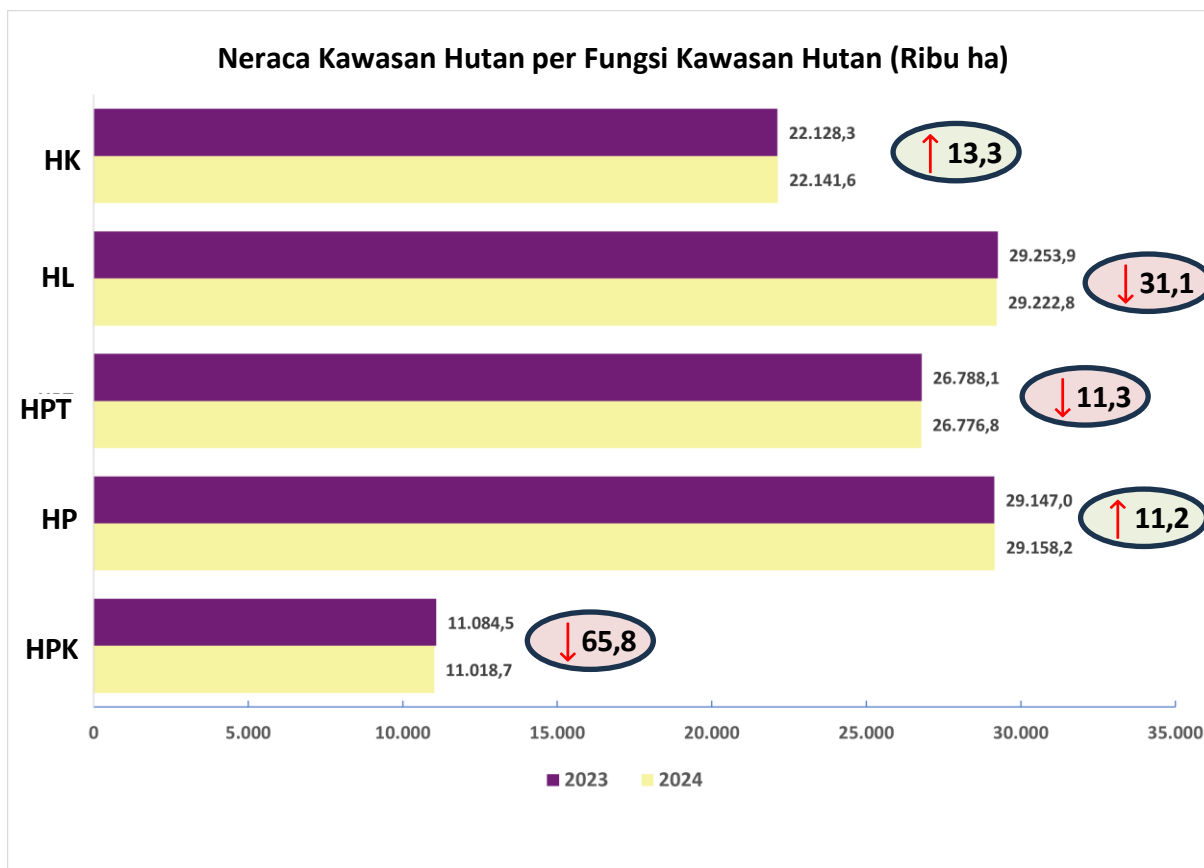
##### 1. Neraca Kawasan Hutan

Gambar 10 menyajikan neraca kawasan hutan yang berupa daratan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2023 dengan tahun 2024. Pada tahun 2023, luas total kawasan hutan sebesar 118,4 juta ha, sementara pada tahun 2024 luas total kawasan hutan sebesar 118,3 juta ha. Berdasarkan data tersebut, luas kawasan hutan mengalami penurunan total sekitar 83,7 ribu ha atau 0,07% dari luasan awal.



Gambar 10. Neraca Kawasan Hutan di Indonesia

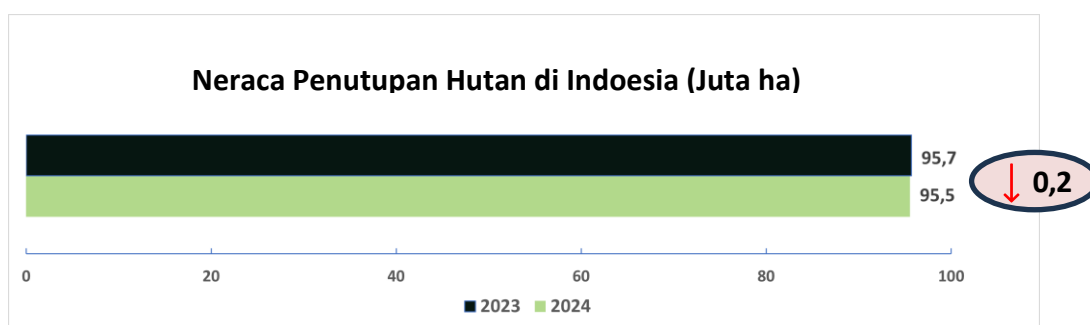
Gambar 11 menunjukkan informasi tentang neraca kawasan hutan. Pada Tahun 2024, fungsi kawasan hutan HL memiliki luasan tertinggi sebesar 29,2 juta ha, diikuti oleh HP sebesar 29,1 juta ha, HPT sebesar 26,8 juta ha, HK sebesar 22,1 juta ha, dan luasan paling kecil pada fungsi kawasan hutan HPK sebesar 11,1 juta ha. Terdapat dua fungsi kawasan hutan yang mengalami kenaikan luas pada tahun 2024 yaitu HK sebesar 13,3 ribu ha, dan HP sebesar 11,2 ribu ha. Di sisi lain fungsi kawasan hutan HPK, HL, dan HP mengalami penurunan dengan angka masing – masing sebesar 65,8 ribu ha, 31,1 ribu ha, dan 11,3 ribu ha.



Gambar 11. Neraca Kawasan Hutan per Fungsi Kawasan Hutan

## 2. Neraca Penutupan Hutan

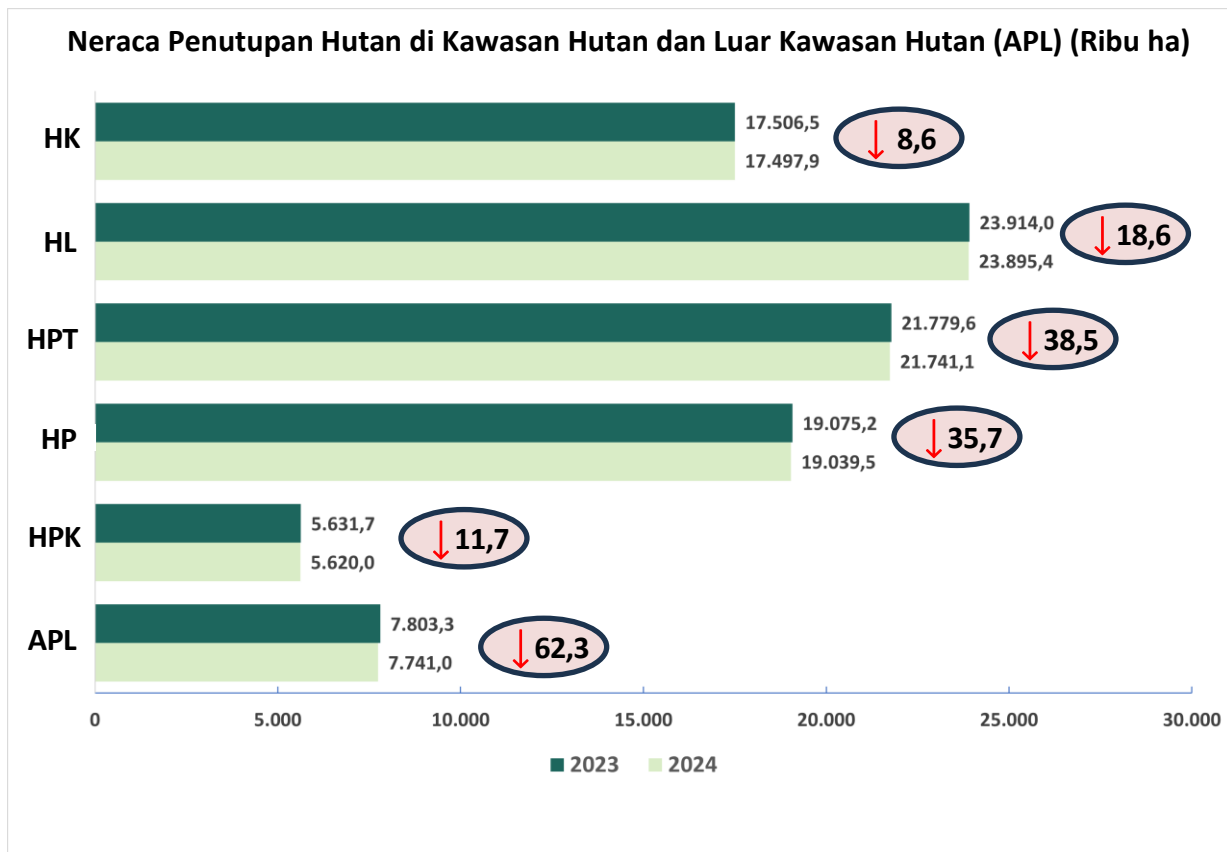
Gambar 12 menyajikan neraca penutupan hutan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2023 dengan tahun 2024. Pada tahun 2023 luas total penutupan hutan sebesar 95,7 juta ha, sedangkan pada tahun 2024 luas total penutupan hutan sebesar 95,5 juta ha. Berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan luas sekitar 175,4 ribu ha atau sekitar 0,2% dari luasan awal.



Gambar 12. Neraca Penutupan Hutan di Indonesia.

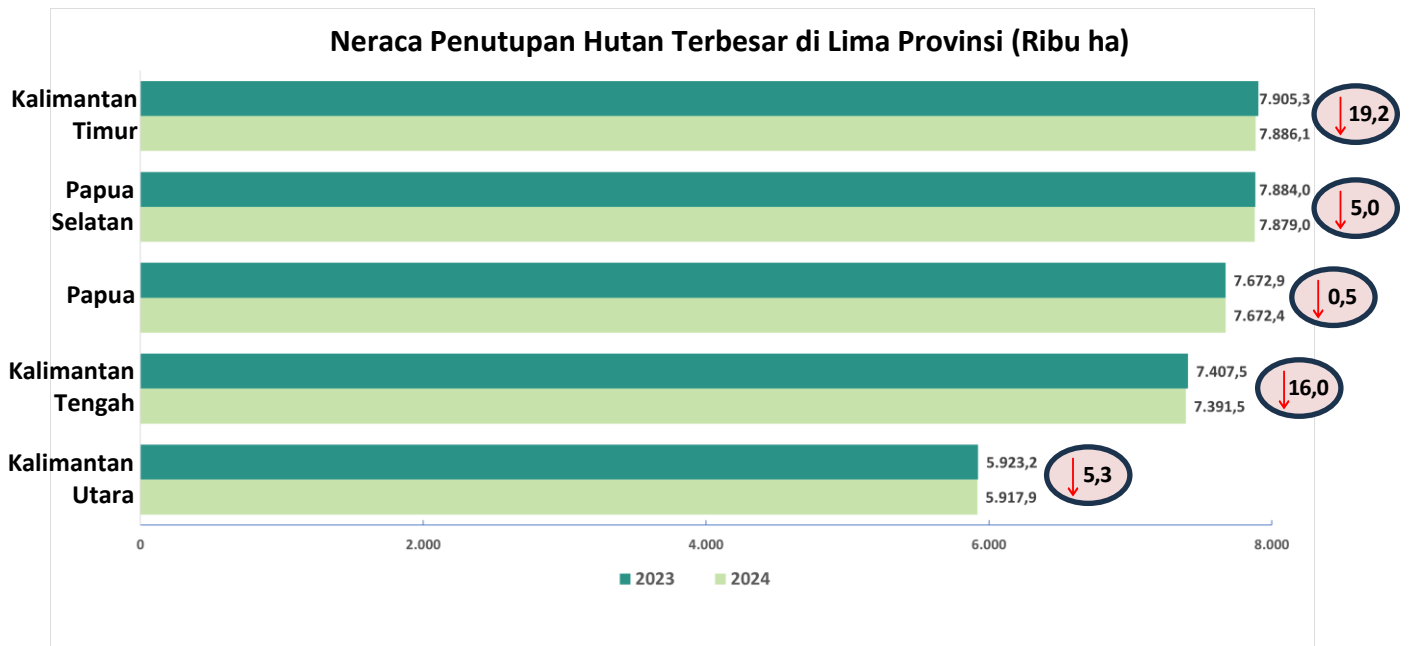
Gambar 13 menunjukkan perbandingan neraca penutupan hutan di dalam dan luar kawasan hutan (APL) antara tahun 2023 dan tahun 2024. Luas total penutupan hutan di kawasan hutan pada tahun 2023 sebesar 87,9 juta ha dan pada tahun 2024 sebesar 87,8 juta

ha. Pada seluruh wilayahnya, fungsi kawasan hutan mengalami penurunan luas penutupan hutan. Fungsi kawasan hutan HPT mengalami penurunan tertinggi sebesar 38,5 ribu ha, diikuti oleh HP sebesar 35,7, HL sebesar 18,6, HPK sebesar 11,7, dan HK sebesar 8,6 ribu ha. Secara keseluruhan, luas penutupan hutan di seluruh wilayah kawasan hutan mengalami penurunan sebesar 113,1 ribu ha. Penurunan tersebut terjadi juga pada wilayah di luar kawasan hutan (APL) sebesar 62,3 ribu ha.



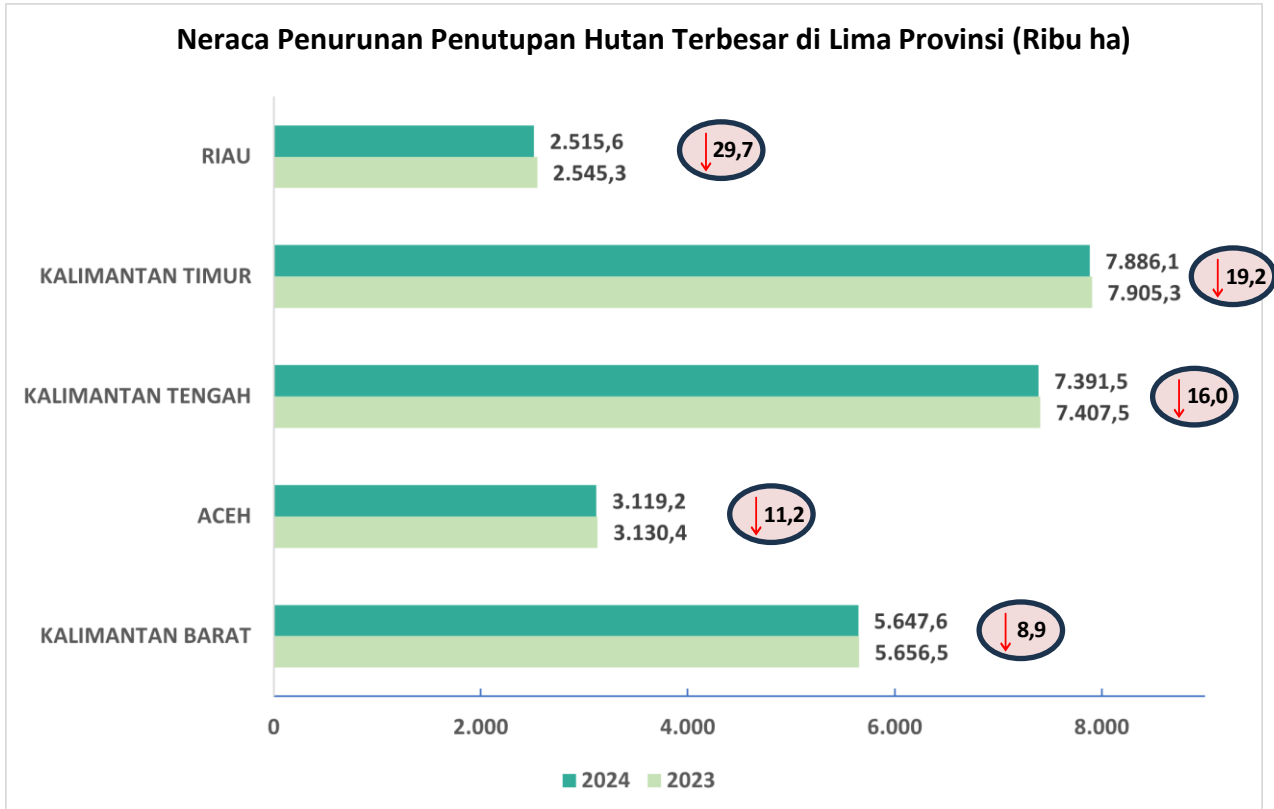
Gambar 13. Neraca Penutupan Hutan di Dalam dan Luar Kawasan Hutan (APL)

Gambar 14 menyajikan neraca penutupan hutan terbesar di dalam dan luar kawasan hutan pada lima provinsi dari 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2023 dengan tahun 2024. Penyajian pada grafik hanya terfokus pada lima wilayah provinsi dengan penutupan hutan terbesar, untuk selebihnya disampaikan secara lengkap pada tabel neraca sumber daya hutan di lampiran. Lima provinsi yang memiliki luas penutupan hutan terbesar adalah Kalimantan Timur, Papua Selatan, Papua, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Masing – masing provinsi mengalami penurunan luas penutupan hutan. Penurunan terbesar terjadi pada Provinsi Kalimantan Timur sebesar 19,2 ribu ha atau 0,2% dari luasan awal, walaupun provinsi tersebut masih memiliki luasan penutupan hutan terbesar.



Gambar 14. Neraca Penutupan Hutan Terbesar di Lima Provinsi

Gambar 15 menyajikan informasi tentang neraca penurunan penutupan hutan terbesar pada lima provinsi di Indonesia pada tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Riau mengalami penurunan penutupan hutan terbesar seluas 29,7 ribu ha, diikuti oleh Kalimantan Timur seluas 19,2 ribu ha, Kalimantan Tengah 16,0 ribu ha, Aceh seluas 11,2 ribu ha, dan Kalimantan Barat seluas 8,9 ribu ha.



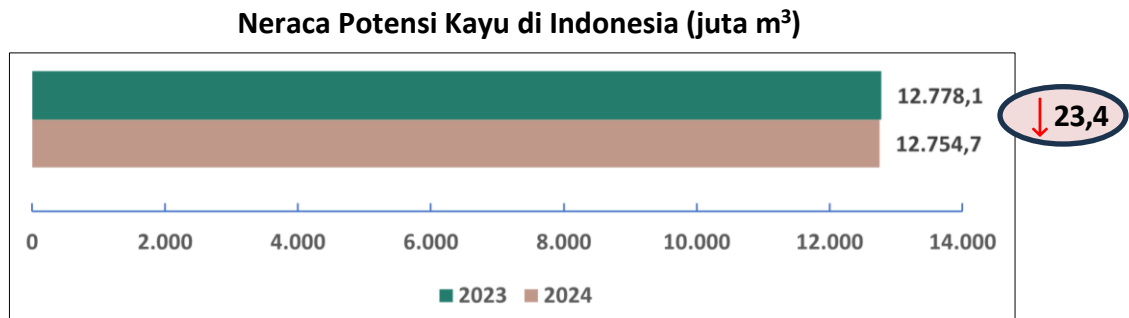
Gambar 15. Neraca Penurunan Penutupan Hutan Terbesar di Lima Provinsi



### c. Neraca Sumber Daya Kayu

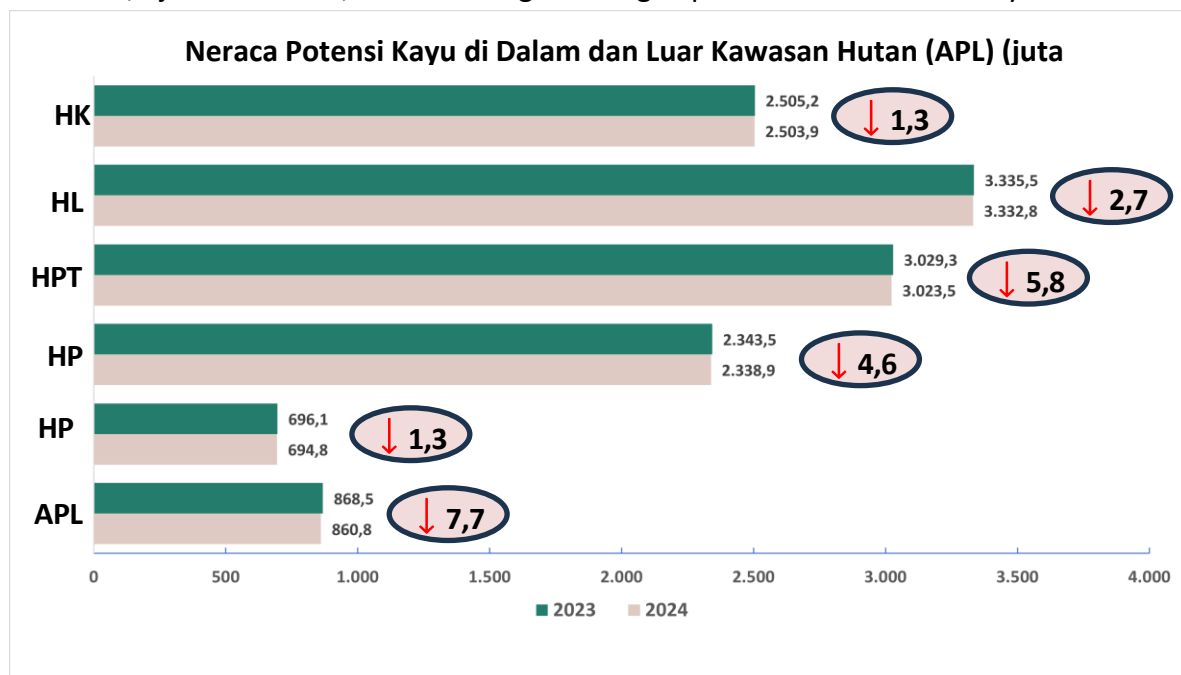
#### 1. Neraca Potensi Kayu

Gambar 16 menyajikan informasi neraca potensi kayu di Indonesia. Berdasarkan data yang ditampilkan, total potensi kayu pada tahun 2023 sebesar 12.778,1 juta m<sup>3</sup>, sedangkan pada tahun 2024 total potensi kayu sebesar 12.754,7 juta m<sup>3</sup>. Potensi kayu mengalami penurunan sebesar 23,4 juta m<sup>3</sup> atau sebesar 0,2% dibandingkan dengan potensi kayu awal.



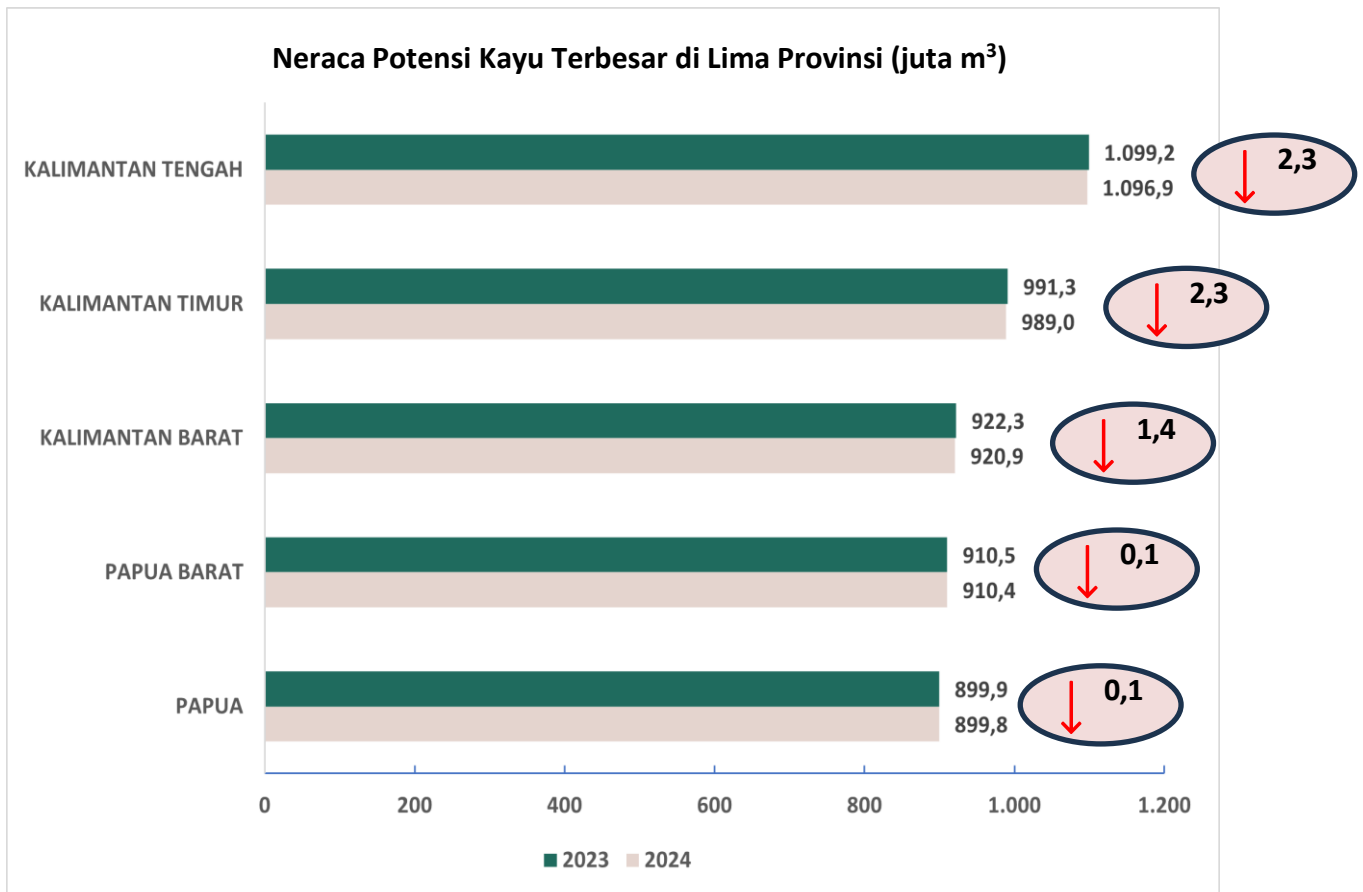
Gambar 16. Neraca Potensi Kayu di Indonesia

Gambar 17 menyajikan informasi neraca potensi kayu di dalam dan luar kawasan hutan (APL) pada tahun 2023 dan tahun 2024. Berdasarkan data yang ditampilkan, total potensi volume kayu pada tahun 2024 sebesar 12.754,7 juta m<sup>3</sup> yang terbagi ke dalam potensi di kawasan hutan sebesar 11.893,9 juta m<sup>3</sup> dan APL sebesar 860,8 juta m<sup>3</sup>. Potensi di kawasan hutan mengalami penurunan sekitar 15,7 juta m<sup>3</sup> atau 0,1 % dibandingkan dengan potensi tahun sebelumnya. Potensi terbesar terdapat pada wilayah kawasan hutan pada fungsi HL yaitu sebesar 3.332,8 juta m<sup>3</sup>, walaupun mengalami penurunan sebesar 2,6 juta m<sup>3</sup> atau 0,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Potensi di wilayah APL juga mengalami penurunan sebesar 7,7 juta m<sup>3</sup> atau 0,9 % dibandingkan dengan potensi tahun sebelumnya.



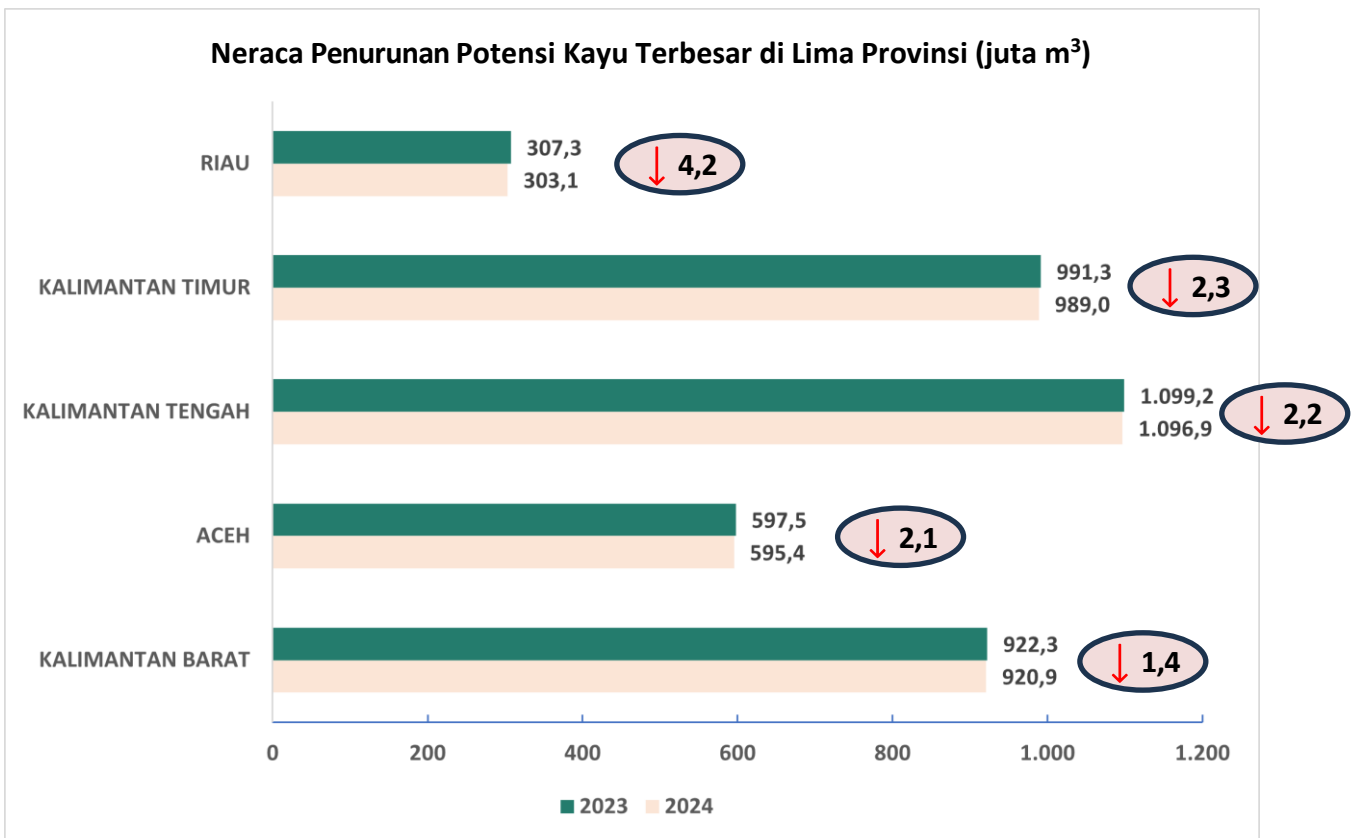
Gambar 17. Neraca Potensi Kayu di Dalam dan Luar Kawasan Hutan (APL)

Gambar 18 menyajikan neraca potensi kayu terbesar pada lima provinsi di Indonesia. Lima provinsi tersebut diantaranya adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Papua. Potensi terbesar terdapat pada provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki potensi kayu sebesar 1.096,9 juta m<sup>3</sup>, walaupun mengalami penurunan potensi sebesar 2,2 juta m<sup>3</sup> atau 0,2% dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan potensi volume kayu terbesar terjadi pada Provinsi Kalimantan Timur, sebesar 2,3 juta m<sup>3</sup> atau 0,2% dibandingkan dengan potensi pada tahun 2023.



Gambar 18. Neraca Potensi Kayu Terbesar di Lima Provinsi

Gambar 19 menyajikan informasi tentang neraca penurunan potensi kayu terbesar pada lima provinsi di Indonesia pada tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Riau mengalami penurunan potensi kayu terbesar sebanyak 4,2 juta m<sup>3</sup>, diikuti oleh Kalimantan Timur sebanyak 2,3 juta m<sup>3</sup>, Kalimantan Tengah sebanyak 2,2 juta m<sup>3</sup>, Aceh sebanyak 2,1 juta m<sup>3</sup>, dan Kalimantan Barat sebanyak 1,4 juta m<sup>3</sup>.

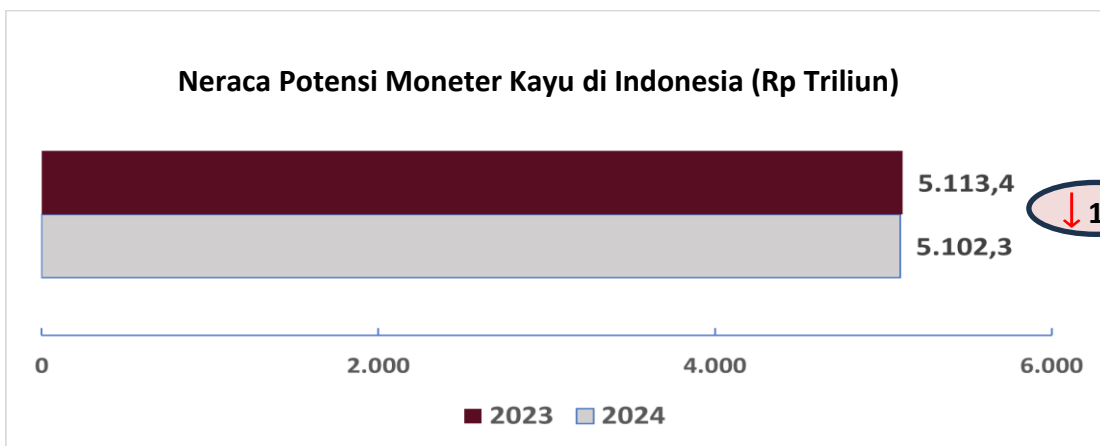


Gambar 19. Neraca Penurunan Potensi Kayu Terbesar di Lima Provinsi

## 2. Neraca Potensi Moneter Kayu

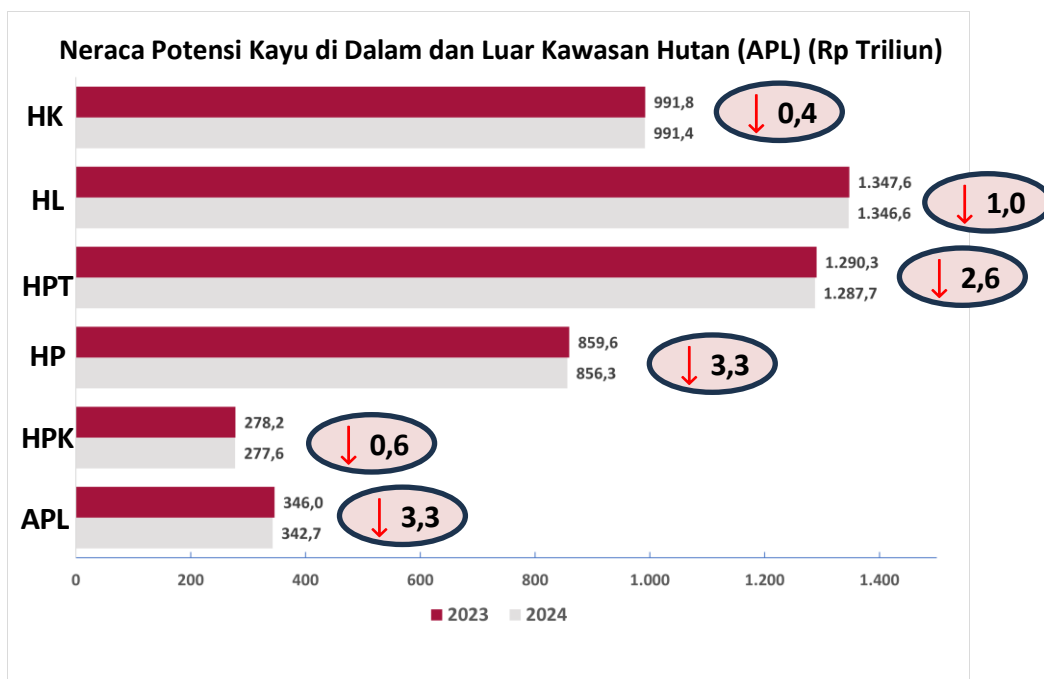
Nilai kayu di dalam dan luar kawasan hutan didapatkan dari perkalian antara potensi kayu dengan nilai harga kayu yang berada di masing – masing daerah. Patokan harga kayu yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 64 tahun 2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) dan nilai harga kayu dari Perum Perhutani pada tahun 2020. Harga kayu yang digunakan yaitu kelompok jenis rimba campuran (komersil dua) dengan dimensi kayu bulat sedang. Harga ini dianggap tidak membuat nilai harga kayu terlalu tinggi atau rendah.

Gambar 20 menyajikan informasi tentang neraca potensi moneter kayu di Indonesia pada tahun 2023 dan tahun 2024. Pada tahun 2023, total potensi moneter kayu sebesar Rp 5.113,4 Triliun, sedangkan pada tahun 2024 total potensi moneter kayu sebesar Rp 5.102,3 Triliun. Berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan total potensi moneter kayu sebesar Rp 11,1 Triliun atau 0,2% dari saldo awal.



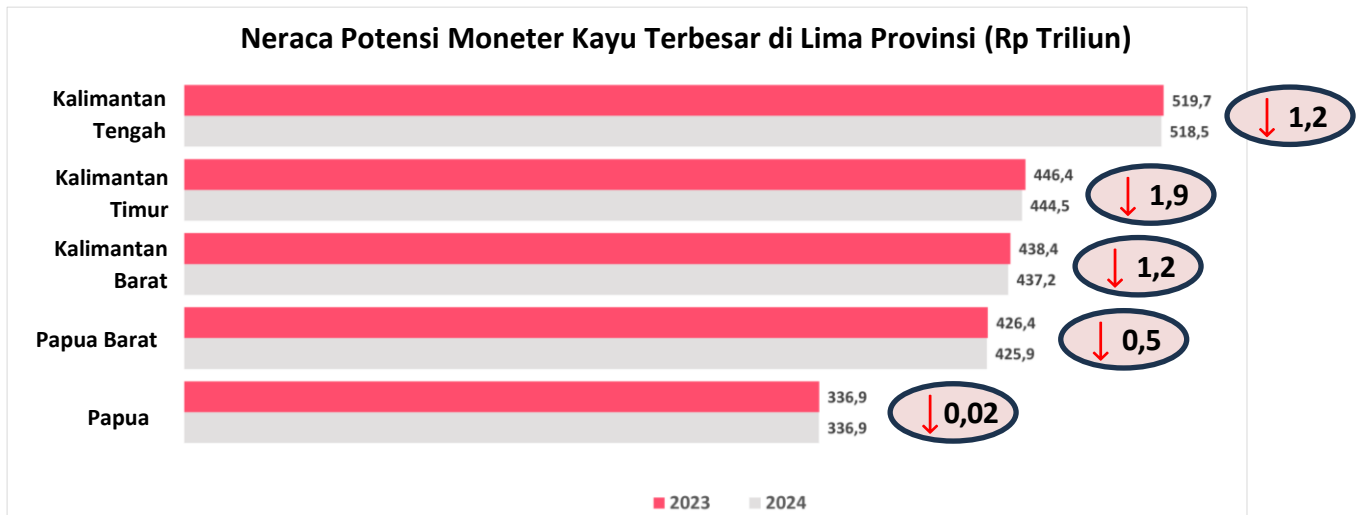
Gambar 20. Neraca Potensi Moneter Kayu di Indonesia

Gambar 21 menyajikan neraca potensi moneter kayu di dalam dan luar kawasan hutan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Potensi moneter kayu pada tahun 2024 terbagi ke dalam potensi moneter kayu kawasan hutan sebesar Rp. 4.759,6 Triliun dan APL sebesar Rp. 342,7 Triliun. Potensi pada kawasan hutan mengalami penurunan sebesar Rp. 7,9 Triliun dibandingkan dengan potensi sebelumnya. Potensi moneter kayu terbesar tahun 2024 terdapat pada fungsi kawasan hutan HL dengan nilai Rp. 1.346,6 Triliun walaupun mengalami penurunan nilai sebesar Rp. 1,0 Triliun atau 0,1% dibandingkan dengan tahun 2023. Seluruh fungsi kawasan hutan mengalami penurunan potensi moneter kayu. Potensi moneter kayu pada wilayah APL mengalami penurunan sebesar Rp. 3,3 Triliun atau 0,9% dibandingkan dengan tahun 2023.



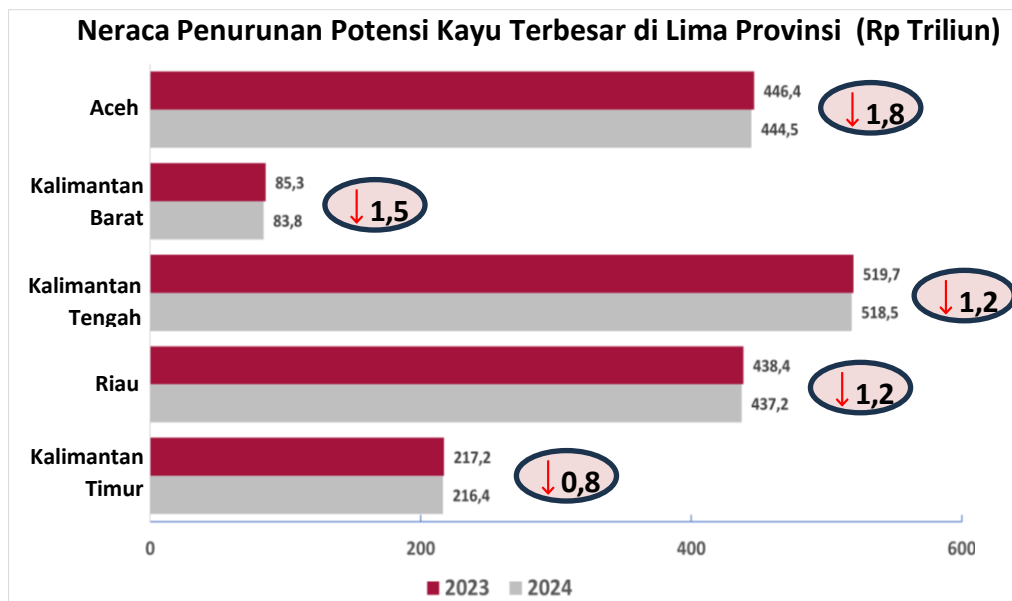
Gambar 21. Neraca Potensi Moneter Kayu di Dalam dan Luar Kawasan Hutan (APL)

Gambar 22 menyajikan neraca potensi moneter kayu terbesar pada lima provinsi di Indonesia. Lima provinsi yang mempunyai potensi moneter kayu terbesar diantaranya adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi moneter kayu terbesar pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp 518,5 Triliun, walaupun mengalami penurunan sebesar Rp 1,2 Triliun atau 0,2% dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan potensi moneter kayu tahun 2024 terbesar terjadi pada Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami penurunan sebesar Rp 1,9 Triliun atau 0,4% dibandingkan dengan potensi moneter kayu pada tahun 2023.



Gambar 22. Neraca Potensi Moneter Kayu Terbesar di Lima Provinsi

Gambar 23 menyajikan informasi tentang neraca penurunan potensi moneter kayu terbesar pada lima provinsi di Indonesia pada tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Riau mengalami penurunan potensi kayu terbesar sebanyak 4,2 juta m<sup>3</sup>, diikuti oleh Kalimantan Timur sebanyak 2,3 juta m<sup>3</sup>, Kalimantan Tengah sebanyak 2,2 juta m<sup>3</sup>, Aceh sebanyak 2,1 juta m<sup>3</sup>, dan Kalimantan Barat sebanyak 1,4 juta m<sup>3</sup>.



Gambar 23. Neraca Penurunan Potensi Kayu Terbesar di Lima Provinsi

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Standardisasi Nasional (2014). *Standar Nasional Indonesia SNI 8033:2014 Metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visual*. Badan Standardisasi Nasional ICS. 65.020. 9p.

Bahruni, Nugroho, B., Kartodihardjo, H., & Hendrayanto. (2002). *Penyusunan Pengkajian Nilai Intrinsik Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi [Laporan Utama]*. Bandung: Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat dan PT Ushakindo Jaya Konsultan.

Campbell, K., & Landry, S. (1998). *City of Tampa Urban Ecological Analysis*. Tampa: University of South Florida.

Cao, S., X. Suo, C. Xia, Z. Yu, F. Feng. (2020). Net value of forest ecosystem services in China. *Ecological Engineering*. 142. 105645. 7p. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.105645>

Costanza, R., R. d'Arge, R. de Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R.V. O'Neill, J. Paruelo, R.G.Raskin, P. Sutton, M. v.d. Belt, (1997). *The Value of The World's Ecosystem Services and Natural Capital*. *Nature*. 387. pp. 253-260

Darusman, D. (1991). *Neraca Sumber Daya Alam Hutan*. Lokakarya Sumber Daya Alam Nasional. Dewan Riset Nasional, Bogor 7-9 Januari 1991, pp. 89-94

Fraumeni, B.M., S. Okubo. (2005). *R&D in the National Income and Product Accounts*. Chapter 8. in *Measuring Capital in the New Economy*. edited: C. Corrado, J. Haltiwanger, D. Sichel. pp. 274-322. Univ Chicago Press.

Galicia, L., A.E. Zarco-Arista, (2014). *Multiple ecosystem services, possible trade-offs, and synergies in a temperate forest ecosystem in Mexico: a review*. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Service & Management*, 10, 4, pp. 275-288

Gaodi, X., Wenhua, L., Yu, X., Biao, Z., Chunxia, L., Kai, A., . . . Jinzeng, W. (2009). *Forest Ecosystem Services and Their Values in Beijing*. 55.

Ghazoul, J., C. Garcia, C.G. Kushalappa. (2009). *Landscape labelling: A concept for next-generation payment for ecosystem service schemes*. *Forest Ecology and Management*, 258, pp. 1889-1895.

Gregorio, Antonio di. (2005). *Land Cover Classification System*. Classification Concepts and User Manual. Software version 2. Food and Agriculture Organization. 190p.

Kementerian Kehutanan. (2024). *The State of Indonesia's Forests (SOIFO) 2024*.

Jakarta : Kementerian Kehutanan.

Kementerian Kehutanan. (2025). *Statistik Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2024*. Jakarta : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan*. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Potensi Sumber Daya Hutan Dari Plot Inventarisasi*. Jakarta : Kementerian Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Neraca Sumber Daya Hutan 2023*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan , Kementerian Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Statistik 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan*. Jakarta : Kementerian Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan , Kementerian Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Statistik 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan*. Jakarta : Kementerian Kehutanan.

Menteri Kehutanan dan Perkebunan. 1999. *Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 644 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional*. Jakarta

Lin, J. C., Chiou, C. R., Chan, W. H., & Wu, M. S. (2021). Valuation of Forest Ecosystem Services in Taiwan. *Forests*. 12. 1694. 16 p. <https://doi.org/10.3390/f12121694> .

Perhutani.(2020). *Data Standing Stok Rerata Hutan Produksi (HPT dan HP) di Pulau Jawa (Tidak Termasuk Provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta)*(Unpublished).

Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228. Jakarta.

Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33. Jakarta.

Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Sekretariat Negara. Jakarta

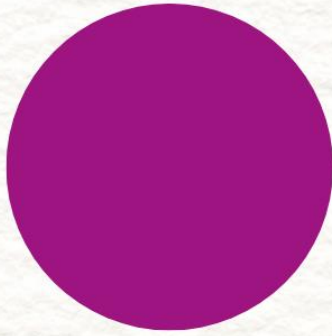
Repetto, T., (1988), *The forest for the trees? Government policies and the misuse of forest resources*. World Resources Institute.

Salim, E. (1990). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Gramedia

United Nations (UN), European Commission (EC), International Monetary Fund (IMF), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank (WB). (2009). *System of National Accounts 2008*. United Nations: New York

United Nations (UN), European Commission (EC), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), International Monetary Fund (IMF), Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank (WB). (2014) *System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Central Framework*. United Nations: New York





# LAMPIRAN

LAMPIRAN

Neraca Sumber Daya Hutan

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
	<b>Indonesia</b>									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	17.506,5	2.505,2	991,8	-8,6	-1,3	-0,5	17.497,9	2.503,9	991,4
	HL	23.914,0	3.335,5	1.347,6	-18,6	-2,6	-1,0	23.895,4	3.332,8	1.346,6
	HPT	21.779,6	3.029,3	1.290,3	-38,5	-5,8	-2,6	21.741,1	3.023,5	1.287,7
	HP	19.075,2	2.343,5	859,6	-35,7	-4,6	-3,3	19.039,5	2.338,9	856,3
	HPK	5.631,7	696,1	278,2	-11,7	-1,3	-0,5	5.620,0	694,8	277,6
	<b>Total KH</b>	<b>87.907,0</b>	<b>11.909,6</b>	<b>4.767,5</b>	<b>-113,1</b>	<b>-15,7</b>	<b>-7,9</b>	<b>87.793,9</b>	<b>11.893,9</b>	<b>4.759,6</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>7.803,3</b>	<b>868,5</b>	<b>346,0</b>	<b>-62,3</b>	<b>-7,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>7.741,0</b>	<b>860,8</b>	<b>342,7</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>95.710,3</b>	<b>12.778,1</b>	<b>5.113,4</b>	<b>-175,4</b>	<b>-23,4</b>	<b>-11,1</b>	<b>95.534,9</b>	<b>12.754,7</b>	<b>5.102,3</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
1.	<b>P. Sumatera</b>									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	3.894,2	649,2	239,8	-7,0	-1,1	-0,4	3.887,2	648,0	239,4
	HL	3.722,6	646,2	238,1	-9,8	-1,5	-0,6	3.712,8	644,7	237,5
	HPT	1.232,4	173,3	61,7	-17,1	-2,4	-0,9	1.215,3	170,9	60,8
	HP	3.958,2	510,0	124,6	-20,9	-2,7	-1,0	3.937,3	507,3	123,6
	HPK	180,2	20,8	7,3	-2,8	-0,3	-0,1	177,4	20,5	7,2
	<b>Total KH</b>	<b>12.987,6</b>	<b>1.999,5</b>	<b>671,6</b>	<b>-57,6</b>	<b>-8,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>12.930,0</b>	<b>1.991,4</b>	<b>668,6</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>1.080,4</b>	<b>144,0</b>	<b>49,4</b>	<b>-20,4</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>1.059,9</b>	<b>141,1</b>	<b>48,4</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>14.068,0</b>	<b>2.143,5</b>	<b>721,0</b>	<b>-78,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>13.990,0</b>	<b>2.132,6</b>	<b>716,9</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
1.1	Prov. Aceh									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	776,3	143,2	52,7	-0,8	-0,1	-0,0	775,4	143,1	52,7
	HL	1.633,1	319,3	117,9	-2,0	-0,4	-0,1	1.631,1	318,9	117,8
	HPT	113,1	22,4	8,0	-0,3	-0,1	-0,0	112,9	22,3	8,0
	HP	369,6	69,2	24,0	-2,2	-0,4	-0,2	367,4	68,7	23,9
	HPK	2,0	0,2	0,1	-0,0	-0,0	-0,0	2,0	0,2	0,1
	<b>Total KH</b>	2.894,1	554,3	202,7	<b>-5,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,4</b>	2.888,8	553,2	202,4
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	236,3	43,3	14,5	<b>-5,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,4</b>	230,4	42,2	14,1
	<b>Total KH + APL</b>	3.130,4	597,5	217,2	<b>-11,2</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,8</b>	3.119,2	595,4	216,4

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
1.2	Prov. Sumatera Utara									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	376,3	74,7	27,6	-0,5	-0,1	-0,0	375,8	74,6	27,6
	HL	725,4	138,9	50,7	-1,4	-0,2	-0,1	724,1	138,7	50,6
	HPT	318,8	61,2	22,6	-1,3	-0,3	-0,1	317,6	60,9	22,5
	HP	328,1	50,9	15,0	-0,6	-0,1	-0,0	327,5	50,8	14,9
	HPK	9,1	1,7	0,6	-0,2	-0,0	-0,0	8,9	1,6	0,6
	<b>Total KH</b>	1.757,7	327,3	116,4	<b>-3,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,3</b>	1.753,8	326,6	116,1
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	182,0	29,9	10,4	<b>-3,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>	178,9	29,4	10,2
	<b>Total KH + APL</b>	1.939,7	357,2	126,8	<b>-7,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,5</b>	1.932,7	356,0	126,4

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
1.3	Prov. Sumatera Barat									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	667,2	101,2	37,5	-1,1	-0,2	-0,1	666,1	101,1	37,4
	HL	571,2	86,9	32,1	-1,5	-0,2	-0,1	569,7	86,7	32,1
	HPT	148,6	22,6	8,0	-1,0	-0,2	-0,1	147,6	22,4	8,0
	HP	259,0	38,3	13,5	-0,5	-0,1	-0,0	258,5	38,2	13,5
	HPK	65,0	9,0	3,2	-0,7	-0,1	-0,0	64,3	8,9	3,1
	<b>Total KH</b>	<b>1.711,0</b>	<b>258,0</b>	<b>94,3</b>	<b>-4,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>1.706,2</b>	<b>257,3</b>	<b>94,0</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>174,7</b>	<b>25,0</b>	<b>9,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>172,9</b>	<b>24,8</b>	<b>8,9</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>1.885,7</b>	<b>283,0</b>	<b>103,3</b>	<b>-6,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>1.879,1</b>	<b>282,0</b>	<b>102,9</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
1.4	Prov. Riau									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	462,5	67,8	25,0	-2,3	-0,4	-0,1	460,2	67,4	24,8
	HL	83,1	11,3	4,2	-2,3	-0,4	-0,1	80,8	10,9	4,0
	HPT	319,0	26,6	8,8	-7,9	-1,1	-0,4	311,1	25,5	8,4
	HP	1.540,6	189,2	43,4	-11,2	-1,5	-0,6	1.529,3	187,7	42,8
	HPK	60,2	5,9	2,0	-1,9	-0,2	-0,1	58,3	5,7	1,9
	<b>Total KH</b>	<b>2.465,4</b>	<b>300,8</b>	<b>83,4</b>	<b>-25,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1,4</b>	<b>2.439,8</b>	<b>297,1</b>	<b>82,0</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>79,9</b>	<b>6,6</b>	<b>2,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>75,8</b>	<b>6,0</b>	<b>1,8</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>2.545,3</b>	<b>307,3</b>	<b>85,3</b>	<b>-29,7</b>	<b>-4,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>2.515,6</b>	<b>303,1</b>	<b>83,8</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
1.5	Prov. Kepulauan Riau									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,1	0,0
	HL	55,7	6,0	2,2	-0,0	-0,0	-0,0	55,6	6,0	2,2
	HPT	76,2	5,6	2,1	-0,1	-0,0	-0,0	76,1	5,6	2,1
	HP	47,4	3,8	1,4	-0,0	-0,0	-0,0	47,4	3,7	1,4
	HPK	43,6	4,0	1,5	-0,1	-0,0	-0,0	43,5	4,0	1,5
	<b>Total KH</b>	<b>224,0</b>	<b>19,4</b>	<b>7,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>223,9</b>	<b>19,4</b>	<b>7,2</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>105,5</b>	<b>8,7</b>	<b>3,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>105,3</b>	<b>8,7</b>	<b>3,2</b>
<b>Total KH + APL</b>	<b>329,5</b>	<b>28,1</b>	<b>10,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>329,1</b>	<b>28,1</b>	<b>10,4</b>	



No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
1.6	Prov. Jambi									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	579,0	103,1	38,2	-0,9	-0,1	-0,1	578,1	103,0	38,1
	HL	139,1	23,4	8,7	-0,6	-0,1	-0,0	138,6	23,4	8,6
	HPT	120,1	16,9	6,0	-2,9	-0,3	-0,1	117,1	16,6	5,8
	HP	488,7	61,6	14,0	-2,1	-0,2	-0,1	486,6	61,3	13,9
	HPK	0,2	0,0	0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,2	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>1.327,1</b>	<b>205,1</b>	<b>66,8</b>	<b>-6,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>1.320,6</b>	<b>204,3</b>	<b>66,5</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>146,1</b>	<b>17,9</b>	<b>6,2</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>144,3</b>	<b>17,7</b>	<b>6,1</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>1.473,2</b>	<b>223,0</b>	<b>73,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>1.464,9</b>	<b>222,0</b>	<b>72,6</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
1.7	Prov. Bengkulu									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	390,3	72,4	26,8	-0,8	-0,1	-0,0	389,5	72,3	26,7
	HL	147,2	25,6	9,5	-0,4	-0,1	-0,0	146,8	25,6	9,5
	HPT	53,4	7,9	2,9	-2,4	-0,3	-0,1	50,9	7,6	2,8
	HP	29,0	4,9	1,8	-0,7	-0,1	-0,0	28,3	4,9	1,8
	HPK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>619,8</b>	<b>110,9</b>	<b>41,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>615,5</b>	<b>110,3</b>	<b>40,8</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>23,8</b>	<b>3,0</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>23,4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,1</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>643,7</b>	<b>113,9</b>	<b>42,2</b>	<b>-4,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>638,8</b>	<b>113,2</b>	<b>41,9</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
1.8	Prov. Sumatera Selatan									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	392,1	42,8	15,8	-0,5	-0,1	-0,0	391,6	42,7	15,8
	HL	231,6	25,3	9,3	-1,1	-0,1	-0,0	230,5	25,3	9,3
	HPT	73,3	8,9	2,9	-1,2	-0,1	-0,1	72,1	8,8	2,8
	HP	800,5	87,2	10,1	-0,5	-0,0	-0,0	800,0	87,2	10,0
	HPK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>1.497,5</b>	<b>164,3</b>	<b>38,1</b>	<b>-3,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>1.494,2</b>	<b>164,0</b>	<b>38,0</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>60,2</b>	<b>6,1</b>	<b>1,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>59,5</b>	<b>6,0</b>	<b>1,8</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>1.557,7</b>	<b>170,3</b>	<b>39,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>1.553,7</b>	<b>170,0</b>	<b>39,8</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
1.9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	12,7	0,4	0,2	-0,1	-0,0	-0,0	12,7	0,4	0,1
	HL	82,1	2,6	1,0	-0,4	-0,0	-0,0	81,7	2,6	1,0
	HPT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HP	82,5	3,5	1,3	-3,0	-0,2	-0,1	79,5	3,3	1,2
	HPK	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>177,4</b>	<b>6,5</b>	<b>2,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>173,9</b>	<b>6,3</b>	<b>2,3</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>56,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>54,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>
<b>Total KH + APL</b>	<b>233,6</b>	<b>8,7</b>	<b>3,2</b>	<b>-5,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>227,9</b>	<b>8,4</b>	<b>3,1</b>	

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
1.10	Prov. Lampung									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	236,8	43,5	16,1	-0,1	-0,0	-0,0	236,7	43,5	16,1
	HL	54,1	6,8	2,5	-0,1	-0,0	-0,0	54,0	6,8	2,5
	HPT	9,9	1,3	0,5	-0,0	-0,0	-0,0	9,9	1,3	0,5
	HP	12,8	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	12,8	1,4	0,1
	HPK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>313,6</b>	<b>53,1</b>	<b>19,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>313,4</b>	<b>53,0</b>	<b>19,2</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>15,6</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>15,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>329,1</b>	<b>54,3</b>	<b>19,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>328,9</b>	<b>54,3</b>	<b>19,7</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
2	<b>P. Jawa</b>									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	431,7	41,9	8,8	-0,5	-0,1	-0,0	431,1	41,9	8,8
	HL	493,7	34,4	8,7	-0,2	-0,0	-0,0	493,5	34,4	8,7
	HPT	315,0	13,7	5,8	-0,1	-0,0	-0,0	314,9	13,7	5,8
	HP	1.094,3	45,1	22,2	-0,3	-0,0	-0,0	1.094,0	45,1	22,2
	HPK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>2.334,7</b>	<b>135,2</b>	<b>45,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>2.333,6</b>	<b>135,1</b>	<b>45,5</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>394,0</b>	<b>17,1</b>	<b>7,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>393,9</b>	<b>17,1</b>	<b>7,3</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>2.728,8</b>	<b>152,2</b>	<b>52,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>2.727,6</b>	<b>152,2</b>	<b>52,8</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
2.1	Prov. Banten									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	78,2	9,4	1,9	0,0	0,0	0,0	78,2	9,4	1,9
	HL	7,5	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	7,5	0,6	0,1
	HPT	41,6	1,1	0,5	-0,0	-0,0	-0,0	41,5	1,1	0,5
	HP	17,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	17,0	0,5	0,2
	HPK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>144,3</b>	<b>11,7</b>	<b>2,7</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>144,2</b>	<b>11,7</b>	<b>2,7</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>26,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>26,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>171,1</b>	<b>12,9</b>	<b>3,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>171,0</b>	<b>12,9</b>	<b>3,2</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
2.2	Prov. DKI Jakarta									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
	HL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HPT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HP	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	HPK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>



No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
2.3	Prov. Jawa Barat									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	151,5	11,5	2,5	-0,0	-0,0	-0,0	151,5	11,5	2,5
	HL	159,3	8,9	2,3	0,0	0,0	0,0	159,3	8,9	2,3
	HPT	113,0	3,1	1,2	-0,0	-0,0	-0,0	113,0	3,1	1,2
	HP	128,5	4,0	1,8	-0,1	-0,0	-0,0	128,5	4,0	1,8
	HPK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>552,3</b>	<b>27,5</b>	<b>7,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>552,2</b>	<b>27,5</b>	<b>7,8</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>117,9</b>	<b>4,3</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>117,8</b>	<b>4,3</b>	<b>1,7</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>670,2</b>	<b>31,8</b>	<b>9,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>670,0</b>	<b>31,8</b>	<b>9,6</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
2.4	Prov. Jawa Tengah									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	12,3	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	12,3	0,5	0,1
	HL	70,6	3,1	0,9	0,0	0,0	0,0	70,6	3,1	0,9
	HPT	160,3	9,5	4,1	-0,0	-0,0	-0,0	160,3	9,5	4,1
	HP	310,8	11,1	6,9	-0,0	-0,0	-0,0	310,8	11,1	6,9
	HPK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>554,0</b>	<b>24,2</b>	<b>12,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>554,0</b>	<b>24,2</b>	<b>12,1</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>92,4</b>	<b>3,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>92,5</b>	<b>3,2</b>	<b>1,4</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>646,4</b>	<b>27,4</b>	<b>13,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>646,5</b>	<b>27,4</b>	<b>13,4</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
2.5	Prov. DI Yogyakarta									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,1	0,0
	HL	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
	HPT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HP	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0
	HPK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>15,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>22,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
2.6	Prov. Jawa Timur									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	186,7	20,3	4,2	-0,5	-0,1	-0,0	186,2	20,2	4,2
	HL	254,4	21,8	5,4	-0,2	-0,0	-0,0	254,2	21,8	5,4
	HPT	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
	HP	627,2	29,5	13,3	-0,2	-0,0	-0,0	627,0	29,5	13,3
	HPK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>1.068,5</b>	<b>71,7</b>	<b>22,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>1.067,6</b>	<b>71,6</b>	<b>22,8</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>149,5</b>	<b>8,3</b>	<b>3,7</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>149,5</b>	<b>8,3</b>	<b>3,7</b>
<b>Total KH + APL</b>	<b>1.218,0</b>	<b>80,0</b>	<b>26,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>1.217,1</b>	<b>79,9</b>	<b>26,6</b>	

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
3	<b>P. Bali dan Nusa Tenggara</b>									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	258,9	25,7	9,4	-0,0	-0,0	-0,0	258,9	25,7	9,4
	HL	854,7	83,1	30,6	-1,3	-0,3	-0,1	853,4	82,8	30,5
	HPT	318,6	28,2	10,3	-0,6	-0,2	-0,1	318,0	28,0	10,2
	HP	247,5	21,7	7,9	-0,6	-0,1	-0,0	246,9	21,6	7,8
	HPK	20,2	1,7	0,6	-0,0	-0,0	-0,0	20,2	1,7	0,6
	<b>Total KH</b>	<b>1.699,9</b>	<b>160,4</b>	<b>58,7</b>	<b>-2,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>1.697,5</b>	<b>159,8</b>	<b>58,5</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>924,2</b>	<b>75,0</b>	<b>27,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>923,3</b>	<b>74,9</b>	<b>27,4</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>2.624,1</b>	<b>235,4</b>	<b>86,1</b>	<b>-3,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>2.620,8</b>	<b>234,7</b>	<b>85,9</b>
3.1	Prov. Bali									

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	17,8	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	17,8	1,3	0,4
	HL	68,7	7,5	2,7	0,0	0,0	0,0	68,7	7,5	2,7
	HPT	3,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	3,8	0,4	0,1
	HP	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
	HPK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>90,6</b>	<b>9,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,6</b>	<b>9,1</b>	<b>3,1</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>4,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>95,4</b>	<b>9,5</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,4</b>	<b>9,5</b>	<b>3,2</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
3.2	Prov. Nusa Tenggara Barat									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	79,2	8,1	3,0	-0,0	-0,0	-0,0	79,2	8,1	3,0
	HL	377,6	38,7	14,3	-1,1	-0,3	-0,1	376,4	38,4	14,2
	HPT	219,8	19,9	7,3	-0,4	-0,2	-0,1	219,4	19,7	7,3
	HP	76,9	6,2	2,2	-0,5	-0,0	-0,0	76,4	6,2	2,2
	HPK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total KH</b>	<b>753,5</b>	<b>72,9</b>	<b>26,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>751,5</b>	<b>72,4</b>	<b>26,6</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>113,9</b>	<b>8,3</b>	<b>2,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>113,8</b>	<b>8,3</b>	<b>2,9</b>
<b>Total KH + APL</b>	<b>867,4</b>	<b>81,2</b>	<b>29,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>865,2</b>	<b>80,7</b>	<b>29,5</b>	

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
3.3	Prov. Nusa Tenggara Timur									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	162,0	16,4	6,0	-0,0	-0,0	-0,0	162,0	16,4	6,0
	HL	408,4	37,0	13,6	-0,1	-0,0	-0,0	408,3	37,0	13,6
	HPT	94,9	7,9	2,9	-0,1	-0,0	-0,0	94,8	7,9	2,9
	HP	170,4	15,4	5,7	-0,1	-0,0	-0,0	170,3	15,4	5,7
	HPK	20,2	1,7	0,6	-0,0	-0,0	-0,0	20,2	1,7	0,6
	<b>Total KH</b>	<b>855,8</b>	<b>78,4</b>	<b>28,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>855,5</b>	<b>78,3</b>	<b>28,8</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>805,5</b>	<b>66,3</b>	<b>24,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>804,7</b>	<b>66,2</b>	<b>24,4</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>1.661,3</b>	<b>144,6</b>	<b>53,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>1.660,2</b>	<b>144,6</b>	<b>53,2</b>



No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
4	<b>P. Kalimantan</b>									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	3.860,1	590,2	281,8	-0,4	-0,0	-0,0	3.859,8	590,1	281,8
	HL	5.898,4	947,1	454,6	-1,8	-0,3	-0,1	5.896,6	946,8	454,4
	HPT	9.099,8	1.395,9	668,5	-13,4	-2,3	-1,3	9.086,4	1.393,7	667,3
	HP	6.006,0	759,1	322,3	-9,2	-1,4	-2,1	5.996,8	757,6	320,2
	HPK	558,8	68,2	31,9	-4,7	-0,5	-0,3	554,1	67,6	31,6
	<b>Total KH</b>	<b>25.423,1</b>	<b>3.760,5</b>	<b>1.759,0</b>	<b>-29,5</b>	<b>-4,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>25.393,6</b>	<b>3.755,9</b>	<b>1.755,3</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>2.418,4</b>	<b>268,5</b>	<b>123,4</b>	<b>-24,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-1,4</b>	<b>2.394,4</b>	<b>265,7</b>	<b>122,0</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>27.841,5</b>	<b>4.028,9</b>	<b>1.882,4</b>	<b>-53,5</b>	<b>-7,3</b>	<b>-5,2</b>	<b>27.788,0</b>	<b>4.021,6</b>	<b>1.877,3</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
4.1	Prov. Kalimantan Barat									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	1.157,8	213,3	102,4	-0,1	-0,0	-0,0	1.157,7	213,3	102,4
	HL	1.799,8	308,5	148,1	-0,8	-0,1	-0,1	1.799,0	308,4	148,0
	HPT	1.390,1	233,4	111,7	-2,3	-0,4	-0,2	1.387,8	233,0	111,5
	HP	783,6	102,3	45,2	1,6	0,1	-0,5	785,3	102,4	44,8
	HPK	52,3	6,3	3,0	0,2	0,0	0,0	52,6	6,3	3,0
	<b>Total KH</b>	<b>5.183,7</b>	<b>863,8</b>	<b>410,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>5.182,4</b>	<b>863,4</b>	<b>409,7</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>472,8</b>	<b>58,5</b>	<b>28,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>465,3</b>	<b>57,5</b>	<b>27,5</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>5.656,5</b>	<b>922,3</b>	<b>438,4</b>	<b>-8,9</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,2</b>	<b>5.647,6</b>	<b>920,9</b>	<b>437,2</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
4.2	Prov. Kalimantan Tengah									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	1.091,5	126,7	60,8	-0,1	-0,0	-0,0	1.091,4	126,7	60,8
	HL	972,4	153,9	73,9	-0,3	-0,1	-0,0	972,0	153,9	73,9
	HPT	2.803,5	476,3	228,4	-3,0	-0,5	-0,2	2.800,6	475,8	228,2
	HP	1.957,5	271,3	123,7	-5,8	-0,9	-0,6	1.951,7	270,4	123,1
	HPK	362,4	45,5	21,6	-3,4	-0,4	-0,2	359,0	45,1	21,4
	<b>Total KH</b>	<b>7.187,3</b>	<b>1.073,7</b>	<b>508,4</b>	<b>-12,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>7.174,7</b>	<b>1.071,9</b>	<b>507,4</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>220,2</b>	<b>25,5</b>	<b>11,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>216,8</b>	<b>25,0</b>	<b>11,1</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>7.407,5</b>	<b>1.099,2</b>	<b>519,7</b>	<b>-16,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>7.391,5</b>	<b>1.096,9</b>	<b>518,5</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
4.3	Prov. Kalimantan Selatan									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	146,7	13,1	4,8	-0,1	-0,0	-0,0	146,6	13,1	4,8
	HL	355,7	50,9	24,4	-0,4	-0,1	-0,0	355,3	50,8	24,4
	HPT	81,8	11,5	5,4	0,2	0,0	-0,0	82,0	11,6	5,3
	HP	254,1	33,7	12,9	-1,6	-0,2	-0,1	252,5	33,5	12,8
	HPK	8,8	1,1	0,4	-0,0	-0,0	-0,0	8,8	1,1	0,4
	<b>Total KH</b>	<b>847,1</b>	<b>110,4</b>	<b>47,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>845,2</b>	<b>110,1</b>	<b>47,7</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>101,9</b>	<b>9,5</b>	<b>3,6</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>99,7</b>	<b>9,2</b>	<b>3,5</b>
<b>Total KH + APL</b>	<b>949,0</b>	<b>119,9</b>	<b>51,5</b>	<b>-4,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>944,9</b>	<b>119,3</b>	<b>51,2</b>	

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
4.4	Prov. Kalimantan Timur									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	202,2	21,0	10,1	-0,1	-0,0	-0,0	202,1	21,0	10,1
	HL	1.739,0	259,9	124,7	-0,2	-0,0	-0,0	1.738,8	259,9	124,7
	HPT	2.750,6	355,7	170,0	-7,6	-0,9	-0,5	2.743,0	354,7	169,5
	HP	2.131,7	239,6	90,0	-2,0	-0,3	-0,7	2.129,7	239,3	89,2
	HPK	87,3	10,0	4,3	-1,3	-0,1	-0,1	86,0	9,9	4,2
	<b>Total KH</b>	<b>6.910,8</b>	<b>886,1</b>	<b>399,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>6.899,6</b>	<b>884,7</b>	<b>397,7</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>994,5</b>	<b>105,2</b>	<b>47,3</b>	<b>-8,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>986,5</b>	<b>104,3</b>	<b>46,8</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>7.905,3</b>	<b>991,3</b>	<b>446,4</b>	<b>-19,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,8</b>	<b>7.886,1</b>	<b>989,0</b>	<b>444,5</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
4.5	Prov. Kalimantan Utara									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	1.262,0	216,1	103,7	-0,0	-0,0	-0,0	1.262,0	216,1	103,7
	HL	1.031,6	173,9	83,5	-0,1	-0,0	-0,0	1.031,5	173,9	83,5
	HPT	2.073,7	319,0	153,0	-0,7	-0,4	-0,2	2.073,0	318,6	152,7
	HP	879,1	112,2	50,5	-1,5	-0,2	-0,1	877,6	112,0	50,3
	HPK	47,9	5,3	2,5	-0,2	-0,0	-0,0	47,6	5,3	2,5
	<b>Total KH</b>	<b>5.294,2</b>	<b>826,4</b>	<b>393,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>5.291,7</b>	<b>825,8</b>	<b>392,8</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>629,0</b>	<b>69,9</b>	<b>33,2</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>626,2</b>	<b>69,7</b>	<b>33,1</b>
<b>Total KH + APL</b>	<b>5.923,2</b>	<b>896,3</b>	<b>426,4</b>	<b>-5,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>5.917,9</b>	<b>895,5</b>	<b>425,9</b>	

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
5	<b>P. Sulawesi</b>									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	1.510,0	221,2	81,8	-0,4	-0,0	-0,0	1.509,6	221,1	81,8
	HL	3.517,4	412,9	152,7	-4,9	-0,5	-0,2	3.512,5	412,4	152,5
	HPT	2.466,0	330,1	121,4	-6,5	-0,8	-0,3	2.459,5	329,3	121,1
	HP	733,6	86,1	31,5	-4,2	-0,4	-0,1	729,3	85,8	31,4
	HPK	166,2	21,6	7,9	-1,2	-0,1	-0,0	165,1	21,5	7,9
	<b>Total KH</b>	<b>8.393,2</b>	<b>1.071,9</b>	<b>395,4</b>	<b>-17,2</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>8.376,1</b>	<b>1.070,1</b>	<b>394,7</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>827,2</b>	<b>90,7</b>	<b>33,4</b>	<b>-10,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>817,1</b>	<b>89,6</b>	<b>33,0</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>9.220,4</b>	<b>1.162,6</b>	<b>428,8</b>	<b>-27,2</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>9.193,2</b>	<b>1.159,7</b>	<b>427,7</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
5.1	Prov. Sulawesi Utara									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	214,7	49,1	18,2	-0,0	-0,0	-0,0	214,7	49,1	18,2
	HL	110,5	24,2	8,9	-0,0	0,0	0,0	110,5	24,2	8,9
	HPT	145,8	31,7	11,7	-0,1	-0,0	-0,0	145,7	31,7	11,7
	HP	32,9	7,2	2,7	-0,0	-0,0	-0,0	32,9	7,2	2,7
	HPK	11,5	2,3	0,9	0,0	0,0	0,0	11,5	2,3	0,9
	<b>Total KH</b>	<b>515,4</b>	<b>114,5</b>	<b>42,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>515,3</b>	<b>114,5</b>	<b>42,4</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>41,5</b>	<b>7,9</b>	<b>2,9</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>41,5</b>	<b>7,9</b>	<b>2,9</b>
<b>Total KH + APL</b>	<b>556,9</b>	<b>122,4</b>	<b>45,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>556,8</b>	<b>122,4</b>	<b>45,3</b>	



No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
5.2	Prov. Gorontalo									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	192,5	38,4	14,2	0,1	0,0	0,0	192,5	38,4	14,2
	HL	178,6	34,2	12,7	-0,0	-0,0	-0,0	178,6	34,2	12,7
	HPT	194,4	37,0	13,3	0,1	0,0	0,0	194,5	37,0	13,3
	HP	69,7	12,7	4,4	-0,0	-0,0	-0,0	69,7	12,7	4,4
	HPK	10,6	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	10,6	1,9	0,6
	<b>Total KH</b>	<b>645,8</b>	<b>124,2</b>	<b>45,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>645,9</b>	<b>124,2</b>	<b>45,3</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>59,3</b>	<b>11,1</b>	<b>4,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>57,5</b>	<b>10,7</b>	<b>4,0</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>705,0</b>	<b>135,3</b>	<b>49,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>703,4</b>	<b>135,0</b>	<b>49,2</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
5.3	Prov. Sulawesi Tengah									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	567,8	84,3	31,2	-0,1	-0,0	-0,0	567,7	84,3	31,2
	HL	1.144,4	165,6	61,3	-0,4	-0,1	-0,0	1.144,0	165,6	61,2
	HPT	1.213,5	170,0	62,7	-1,1	-0,1	-0,1	1.212,4	169,9	62,6
	HP	315,2	43,2	16,0	-0,7	-0,1	-0,0	314,5	43,1	15,9
	HPK	104,4	14,0	5,2	-0,5	-0,1	-0,0	103,8	13,9	5,2
	<b>Total KH</b>	<b>3.345,3</b>	<b>477,2</b>	<b>176,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>3.342,4</b>	<b>476,8</b>	<b>176,2</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>435,4</b>	<b>50,9</b>	<b>18,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>433,4</b>	<b>50,6</b>	<b>18,7</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>3.780,7</b>	<b>528,0</b>	<b>195,1</b>	<b>-4,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>3.775,8</b>	<b>527,4</b>	<b>194,9</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
5.4	Prov. Sulawesi Tenggara									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	220,1	8,5	3,1	-0,1	-0,0	-0,0	220,1	8,5	3,1
	HL	942,4	61,3	22,7	-1,3	-0,0	-0,0	941,1	61,3	22,7
	HPT	355,2	21,2	7,9	-2,1	-0,1	-0,0	353,1	21,1	7,8
	HP	210,1	9,8	3,6	-2,2	-0,1	-0,0	207,9	9,7	3,6
	HPK	22,0	1,2	0,4	-0,4	-0,0	-0,0	21,6	1,2	0,4
<b>Total KH</b>	<b>1.749,9</b>	<b>102,0</b>	<b>37,7</b>	<b>-6,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>1.743,8</b>	<b>101,7</b>	<b>37,6</b>	
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>118,4</b>	<b>3,9</b>	<b>1,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>116,5</b>	<b>3,8</b>	<b>1,4</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>1.868,3</b>	<b>105,9</b>	<b>39,2</b>	<b>-7,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>1.860,4</b>	<b>105,6</b>	<b>39,0</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
5.5	Prov. Sulawesi Barat									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	177,2	28,8	10,7	-0,1	-0,0	-0,0	177,1	28,8	10,7
	HL	323,4	55,8	20,6	-1,4	-0,2	-0,1	322,0	55,5	20,5
	HPT	239,7	42,1	15,6	-2,7	-0,5	-0,2	237,0	41,6	15,4
	HP	41,2	7,4	2,7	-0,9	-0,2	-0,1	40,4	7,3	2,7
	HPK	6,3	1,2	0,4	-0,3	-0,0	-0,0	6,0	1,1	0,4
	<b>Total KH</b>	<b>787,8</b>	<b>135,2</b>	<b>50,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>782,5</b>	<b>134,3</b>	<b>49,7</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>35,3</b>	<b>6,3</b>	<b>2,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>33,7</b>	<b>6,0</b>	<b>2,2</b>
<b>Total KH + APL</b>	<b>823,1</b>	<b>141,5</b>	<b>52,4</b>	<b>-6,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>816,3</b>	<b>140,3</b>	<b>51,9</b>	

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
5.6	Prov. Sulawesi Selatan									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	137,8	12,1	4,5	-0,2	-0,0	-0,0	137,6	12,1	4,5
	HL	818,1	71,8	26,5	-1,8	-0,2	-0,1	816,4	71,6	26,5
	HPT	317,4	28,1	10,2	-0,6	-0,1	-0,0	316,8	28,0	10,2
	HP	64,3	5,8	2,1	-0,4	-0,0	-0,0	64,0	5,8	2,1
	HPK	11,5	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	11,5	1,0	0,4
	<b>Total KH</b>	<b>1.349,1</b>	<b>118,8</b>	<b>43,7</b>	<b>-2,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>1.346,2</b>	<b>118,5</b>	<b>43,6</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>137,3</b>	<b>10,7</b>	<b>3,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>134,4</b>	<b>10,5</b>	<b>3,9</b>
<b>Total KH + APL</b>	<b>1.486,5</b>	<b>129,5</b>	<b>47,6</b>	<b>-5,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>1.480,6</b>	<b>129,0</b>	<b>47,4</b>	

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
6	<b>P. Maluku dan Papua</b>									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	7.551,5	977,0	370,2	-0,3	-0,0	-0,0	7.551,3	977,0	370,2
	HL	9.427,2	1.211,7	462,9	-0,7	-0,1	-0,0	9.426,5	1.211,7	462,9
	HPT	8.347,8	1.087,9	422,6	-0,9	-0,1	-0,1	8.346,9	1.087,8	422,5
	HP	7.035,6	921,5	351,2	-0,5	-0,1	-0,0	7.035,1	921,5	351,2
	HPK	4.706,2	583,8	230,4	-3,0	-0,2	-0,1	4.703,2	583,6	230,3
	<b>Total KH</b>	<b>37.068,4</b>	<b>4.782,1</b>	<b>1.837,3</b>	<b>-5,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>37.063,0</b>	<b>4.781,5</b>	<b>1.837,0</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>2.159,1</b>	<b>273,3</b>	<b>104,9</b>	<b>-6,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>2.152,3</b>	<b>272,4</b>	<b>104,6</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>39.227,5</b>	<b>5.055,4</b>	<b>1.942,2</b>	<b>-12,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>39.215,2</b>	<b>5.053,9</b>	<b>1.941,6</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
6.1	Prov. Maluku									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	374,8	51,3	24,6	-0,0	-0,0	-0,0	374,8	51,3	24,6
	HL	521,3	71,2	34,2	-0,1	-0,0	-0,0	521,2	71,1	34,1
	HPT	761,9	105,6	50,7	-0,1	-0,0	-0,0	761,8	105,6	50,7
	HP	429,0	56,8	27,3	-0,1	-0,0	-0,0	428,9	56,8	27,3
	HPK	823,9	91,8	44,1	-0,3	-0,0	-0,0	823,6	91,8	44,1
	<b>Total KH</b>	<b>2.910,9</b>	<b>376,8</b>	<b>180,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>2.910,4</b>	<b>376,7</b>	<b>180,8</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>168,6</b>	<b>20,9</b>	<b>10,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>168,5</b>	<b>20,9</b>	<b>10,0</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>3.079,6</b>	<b>397,7</b>	<b>190,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>3.078,9</b>	<b>397,6</b>	<b>190,8</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribuan Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
6.2	Prov. Maluku Utara									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	207,9	27,4	13,2	-0,0	-0,0	-0,0	207,9	27,4	13,2
	HL	482,7	61,7	29,6	-0,0	-0,0	-0,0	482,7	61,6	29,6
	HPT	575,0	78,1	37,3	-0,5	-0,1	-0,0	574,5	78,0	37,3
	HP	382,2	51,4	23,3	-0,3	-0,0	-0,0	382,0	51,4	23,3
	HPK	292,2	39,6	19,0	-0,3	-0,0	-0,0	291,9	39,6	18,9
	<b>Total KH</b>	<b>1.940,0</b>	<b>258,2</b>	<b>122,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>1.938,9</b>	<b>258,1</b>	<b>122,2</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>118,0</b>	<b>13,9</b>	<b>6,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>117,8</b>	<b>13,8</b>	<b>6,6</b>
<b>Total KH + APL</b>	<b>2.058,1</b>	<b>272,1</b>	<b>129,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>2.056,7</b>	<b>271,9</b>	<b>128,9</b>	



No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
6.3	Prov. Papua Barat									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	662,5	114,3	42,3	-0,0	-0,0	-0,0	662,5	114,3	42,3
	HL	835,2	151,5	56,1	-0,0	-0,0	-0,0	835,2	151,5	56,1
	HPT	1.503,5	266,5	98,6	-0,1	-0,0	-0,0	1.503,4	266,5	98,6
	HP	1.570,6	224,3	83,0	-0,0	-0,0	-0,0	1.570,6	224,3	83,0
	HPK	616,2	98,2	36,4	-0,0	-0,0	-0,0	616,2	98,2	36,3
	<b>Total KH</b>	<b>5.188,1</b>	<b>854,9</b>	<b>316,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>5.187,9</b>	<b>854,8</b>	<b>316,3</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>351,9</b>	<b>55,6</b>	<b>20,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>351,8</b>	<b>55,6</b>	<b>20,6</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>5.540,0</b>	<b>910,5</b>	<b>336,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>5.539,6</b>	<b>910,4</b>	<b>336,9</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (RibU Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
6.4	Prov. Papua									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	1.546,4	166,3	61,5	-0,0	-0,0	-0,0	1.546,3	166,3	61,5
	HL	1.842,9	224,9	83,2	-0,0	-0,0	-0,0	1.842,9	224,9	83,2
	HPT	1.989,9	234,0	86,6	-0,1	-0,0	-0,0	1.989,8	233,9	86,6
	HP	1.327,8	165,4	61,2	-0,1	-0,0	-0,0	1.327,7	165,4	61,2
	HPK	570,5	66,5	24,6	-0,0	-0,0	-0,0	570,5	66,5	24,6
	<b>Total KH</b>	<b>7.277,5</b>	<b>857,0</b>	<b>317,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>7.277,2</b>	<b>857,0</b>	<b>317,1</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>395,4</b>	<b>42,9</b>	<b>15,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>395,2</b>	<b>42,8</b>	<b>15,8</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>7.672,9</b>	<b>899,9</b>	<b>333,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>7.672,4</b>	<b>899,8</b>	<b>332,9</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
6.5	Papua Barat Daya									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	1.026,6	207,9	76,9	-0,0	-0,0	-0,0	1.026,6	207,9	76,9
	HL	718,3	128,8	47,7	-0,0	-0,0	-0,0	718,2	128,8	47,7
	HPT	283,3	50,4	18,7	-0,0	-0,0	-0,0	283,3	50,4	18,7
	HP	558,5	89,7	33,2	-0,0	-0,0	-0,0	558,5	89,7	33,2
	HPK	676,0	94,0	34,8	-0,1	-0,0	-0,0	675,9	94,0	34,8
	<b>Total KH</b>	<b>3.262,7</b>	<b>570,9</b>	<b>211,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>3.262,5</b>	<b>570,8</b>	<b>211,2</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>303,0</b>	<b>45,7</b>	<b>16,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>299,4</b>	<b>45,1</b>	<b>16,7</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>3.565,7</b>	<b>616,5</b>	<b>228,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>3.561,9</b>	<b>616,0</b>	<b>227,9</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
6.6	Papua									
	Pegunungan									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	1.469,7	192,4	71,2	-0,1	-0,0	-0,0	1.469,6	192,3	71,2
	HL	1.565,9	207,6	76,8	-0,0	-0,0	-0,0	1.565,8	207,6	76,8
	HPT	434,9	53,4	19,7	-0,0	-0,0	-0,0	434,9	53,4	19,7
	HP	318,5	41,5	15,4	-0,0	-0,0	-0,0	318,5	41,5	15,3
HPK	339,6	44,4	16,4	-0,0	-0,0	-0,0	339,5	44,4	16,4	
	<b>Total KH</b>	<b>4.128,5</b>	<b>539,2</b>	<b>199,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>4.128,3</b>	<b>539,1</b>	<b>199,5</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>26,4</b>	<b>3,4</b>	<b>1,3</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>26,4</b>	<b>3,4</b>	<b>1,3</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>4.155,0</b>	<b>542,6</b>	<b>200,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>4.154,7</b>	<b>542,5</b>	<b>200,7</b>

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
6.7	Papua Selatan									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	917,2	60,8	22,5	-0,0	0,0	0,0	917,2	60,8	22,5
	HL	1.355,1	94,9	35,1	-0,4	-0,0	-0,0	1.354,7	94,9	35,1
	HPT	1.816,5	184,1	68,1	-0,0	-0,0	-0,0	1.816,5	184,1	68,1
	HP	2.236,6	267,6	98,7	-0,1	-0,0	-0,0	2.236,6	267,6	98,7
	HPK	964,9	105,3	39,0	-2,1	-0,1	-0,0	962,8	105,2	38,9
	<b>Total KH</b>	<b>7.290,3</b>	<b>712,7</b>	<b>263,4</b>	<b>-2,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>7.287,7</b>	<b>712,6</b>	<b>263,3</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>593,7</b>	<b>70,6</b>	<b>26,1</b>	<b>-2,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>591,3</b>	<b>70,3</b>	<b>26,0</b>
<b>Total KH + APL</b>	<b>7.884,0</b>	<b>783,3</b>	<b>289,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>7.879,0</b>	<b>782,9</b>	<b>289,4</b>	

No	Wilayah	Saldo Awal (Tahun 2023)			Selisih			Saldo Akhir (Tahun 2024)		
		Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)	Luas Hutan (Ribun Ha)	Potensi Kayu (juta m3)	Potensi Moneter Kayu (Rp T)
6.8	Papua Tengah									
	<b>Kawasan Hutan (KH)</b>									
	HK	1.346,4	156,6	58,0	-0,0	-0,0	-0,0	1.346,4	156,6	58,0
	HL	2.105,8	271,3	100,4	-0,1	-0,0	-0,0	2.105,7	271,2	100,4
	HPT	982,8	115,9	42,9	-0,1	-0,0	-0,0	982,7	115,9	42,9
	HP	212,4	24,8	9,2	-0,0	-0,0	-0,0	212,4	24,8	9,2
	HPK	423,0	43,8	16,2	-0,2	-0,0	-0,0	422,9	43,8	16,2
	<b>Total KH</b>	<b>5.070,3</b>	<b>612,4</b>	<b>226,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>5.070,0</b>	<b>612,4</b>	<b>226,6</b>
	<b>Area Penggunaan Lain (APL)</b>									
	<b>Total APL</b>	<b>202,0</b>	<b>20,4</b>	<b>7,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>201,9</b>	<b>20,4</b>	<b>7,6</b>
	<b>Total KH + APL</b>	<b>5.272,3</b>	<b>632,8</b>	<b>234,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>5.271,9</b>	<b>632,8</b>	<b>234,1</b>

Catatan:

1. Angka atau nilai bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan pembaharuan atau peningkatan akurasi data
2. Potensi kayu merupakan potensi kayu dari tutupan hutan dan potensi kayu dari tutupan vegetasi berkayu